

**PENGARUH IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN
UMUM PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 02/PRT/M/2016 TERHADAP
KUALITAS PENINGKATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS
KOMUNITAS**

**(STUDI PADA KELURAHAN SUKAMENANTI BARU KECAMATAN
KEDATON BANDAR LAMPUNG)**

(Tesis)

Oleh

Riri Rianiti



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PENGARUH IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMER 02/PRT/M/2016 TERHADAP KUALITAS PENINGKATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS (STUDI PADA SUKAMENANTI BARU KECAMATAN KEDATON BANDAR LAMPUNG)

Oleh

RIRI RIANITI

Masalah yang dihadapi Negara padat penduduk kemiskinan dan kawasan kumuh. Salah satu kebijakan Indonesia untuk merespon masalah ini yaitu adanya Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK). Tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk dengan ketersediaan lahan merupakan faktor penyebab dari perumahan kumuh dan permukiman kumuh, seperti yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Rumusan masalah penelitian ini adalah Apakah ada Pengaruh Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat No.02/PRT/M/2016 Terhadap Kualitas Peningkatan Lingkungan Berbasis Komunitas di Kelurahan Sukamenanti Baru? Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Teknik pengumpulan data yaitu kuisisioner dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yaitu editing, tabulasi, koding dan interpretasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu uji korelasi dan uji regresi dengan SPSS. Berdasarkan hasil penelitian ada pengaruh antara implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.02/PRT/M/2016 terhadap Kualitas

Peningkatan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas di Sukamenanti Baru. Hasil penelitian didapat bahwa untuk variabel komunikasi kebijakan terdapat pengaruh 44%, diartikan untuk penyampaian sosialisasi kebijakan, manfaat dan transmisi yang dilakukan selama ini masih kurang maksimal diterima oleh masyarakat, yang bertolak belakang dengan hasil olahan data yang menunjukkan untuk variabel perilaku birokrat berpengaruh 89%, seharusnya implementasi indikator yang ada di perilaku birokrat akan lebih maksimal jika didukung komunikasi yang baik. Berbeda pada variabel Struktur Birokasi dan Sumber Daya, variabel tersebut memiliki pengaruh 77,3% dan 73,4%, dua variabel tersebut memiliki pengaruh karena hal ini merupakan tentang prosedur dan kewenangan yang memang harus dilakukan oleh Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung dalam menjalankan program PLPBK, Sumber Daya berpengaruh karena program ini membutuhkan dukungan dana dan dukungan aparatur yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program tersebut, apabila dikaitkan oleh Struktur Birokrasi Kebijakan, yang salah satu indikatornya kewenangan, maka adanya kaitan antara Sumber Daya dan Struktur Birokrasi Kebijakan yaitu apabila kewenangan dalam pengelolaan dana sebagai salah satu indikator sumber daya disalahgunakan dalam penggunaannya, maka program tersebut tidak maksimal pelaksanaannya.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Permukiman kumuh, Peningkatan Kualitas

ABSTRACT

IMPLEMENTATION EFFECT OF MINISTER OF PUBLIC WORKS AND HOUSING REGULATION NUMBER 02/PRT/ M/2016 TO NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT (STUDY IN SUKAMENANTI BARU AREA KEDATON DISTRICT BANDAR LAMPUNG)

By

RIRI RIANITI

The big problem faced by densely populated countries, such as poverty and slums area. One of Indonesia's policy to respond to this problem, namely the Environmental Planning Community-Based Settlement. Unbalanced growth with the availability of land is one of the causes of the shantytowns and slums, as happened in the city of Bandar Lampung. The population growth is very rapid and disproportionate to the availability of existing land. The problem of this study is are there Effect of Implementation Regulation of the Minister of Public Works of Housing No. 02/PRT/M/2016 Toward Improving the Quality Peningkatan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas in Sukamenanti Baru District of Kedaton Bandar Lampung? This method using quantitative methods. Data collection techniques used questionnaires, documentation, and interviews Data processing techniques, namely editing, tabulation, coding and interpretation. Data analysis technique used is correlation, regression tests, and SPSS. Based on the results of the study explained that looks no influence between the implementation of the Regulation of the Minister of Public Works and Housing People No. 02/PRT/ M / 2016 on Quality Improvement Policy Slum Housing and Slum in New Sukamenanti District of Kedaton Bandar Lampung. Results of research found that for variable policy communication there are significant at 44%, which means that for the delivery of policy dissemination, benefits and transmission are carried out for this is still less than the maximum accepted by society, it is contrary to the processed data showing that for bureaucrats

behavioral variables affect 89%, should the implementation of existing indicators in the behavior of bureaucrats will be maximized if it is supported by a factor of good communication. In contrast to the variable structure of bureaucracy and Resource Development, the variable is considered to have the effect of 77.3% and 73.4%., The two variabel memiliki influence because it is about the procedure and the authority that had to be done by the Department of Public Works in the Lampung Province run the program Resources Development influential in this activity because the program requires financial support and support personnel are needed in the implementation of the program, which when linked by Structure Bureaucracy Policy, which is one indicator is kewenangan, then the link between Resource Development Bureaucratic Structure and Policy ie when authority in the management of funds as an indicator of development resources were being misused in use, the results of such programs did not maksimal the implementation results.

Key words: Policy Implementation, Slums, Quality Improvement

**PENGARUH IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN
UMUM PERUMAHAN RAKYAT NO.02/PRT/M/2016 TERHADAP
KUALITAS PENINGKATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS
KOMUNITAS**

**(Studi Pada Kelurahan Sukamenanti Baru Kecamatan Kedaton Bandar
Lampung)**

Oleh

RIRI RIANITI

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Tesis : **PENGARUH IMPLEMENTASI PERATURAN
MENTERI PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN
RAKYAT NOMOR 02/PRT/M/2016 TERHADAP
KUALITAS PENINGKATAN LINGKUNGAN
PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS (PLPBK)
(Studi pada Kelurahan Sukamenanti Baru
Kecamatan Kedaton Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Riri Rianiti**

No. Pokok Mahasiswa : **1526021004**

Program Studi : **Magister Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Pitojo Budiono, M.Si.
NIP 19640508 199303 1 004

Drs. Ismono Hadi, M.Si.
NIP 19621127 198902 1 002

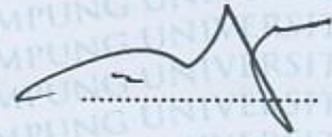
**2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung**

Drs. Herfanto, M.Si., Ph.D.
NIP 19601010 198603 1 006

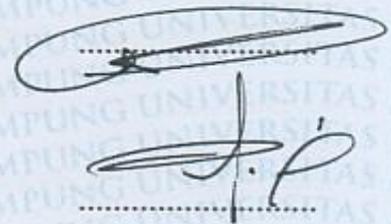
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Pitojo Budiono, M.Si.**



Penguji Utama : **Dr. Suwondo, M.A.**



Sekretaris : **Drs. Ismono Hadi, M.Si.**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Syarif Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003

Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.
NIP. 19530528 198103 1 002

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **20 April 2017**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tesis dengan Judul : **"Pengaruh Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat No. 02/PRT/M/2016 Terhadap Kualitas Peningkatan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Studi pada Kelurahan Sukamenanti Baru Kecamatan Kedaton Bandar Lampung)"**, adalah karya saya sendiri dan tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim Pembimbing dan Penguji dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiatisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung

Bandar Lampung, 20 April 2017
Yang Membuat Pernyataan,



RIRI RIANITI
NPM 1526021004

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 23 Agustus 1992, anak dari pasangan Bapak Ir. Ibnu Suud dan Ibu Dra. Tarmiati. Penulis merupakan anak ketiga dari lima bersaudara.

Jenjang akademis penulis dimulai dengan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Kartika II-5 Bandar Lampung pada tahun 2004, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Negeri 2 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2007. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Negeri 2 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2010. Selanjutnya tahun 2010 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung melalui jalur PKAB. Selanjutnya penulis melanjutkan studi pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung tahun 2015.

PERSEMBAHAN

**Kupersembahkan hasil karya yang sederhana
Untuk orang-orang yang berharga dalam hidupku:**

“Papa dan Mama tercinta”

yang telah memberikan dukungan, perhatian, dan motivasi selama ini dengan kasih sayang tulus tanpa pamrih yang diiringi doa restu kepada Allah SWT

“Kakak dan Adik-Adik Ku”

Abang Robert, Abang Tan, Rara dan Novia terima kasih atas semua motivasinya

Seluruh **keluarga besarku** dan sahabat terbaik yang selalu memberi dukungan dalam proses penyelesaian penyusunan karya ilmiah saya ini

“ALMAMATER UNIVERSITAS LAMPUNG”

“Yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman “

MOTTO

*"Disaat orang lain meragukan kemampuan kita, disitulah
kekuatan kita semestinya semakin tumbuh"*

(William Cowper)

*"Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib
Sesuatuk kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada
Pada diri mereka sendiri"*

(Ar-ra'd, 11)

*"Lebih baik bermandi keringat saat berlatih, daripada menangis darah
saat bertanding"*

(Riri Rianiti)

SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat, karunia dan kasih sayang-Nya lah sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“Pengaruh Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat No.02/PRT/M/2016 Terhadap Kualitas Peningkatan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Studi pada Kelurahan Sukamenanti Baru Kecamatan Kedaton Bandar Lampung)”** yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Ilmu Pemerintahan pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Tesis ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr Sudjarwo, M.S. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung,
2. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan FISIP Universitas Lampung,
3. Bapak Drs. Hertanto, M.Si, Ph.D selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung,
4. Bapak Dr. Suwondo, M.A. selaku Koordinator Sekretariat Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung sekaligus sebagai

penguji utama pada tesis ini yang telah banyak memberikan wawasan ilmu dan motivasi dalam proses penyelesaian tesis ini,

5. Bapak Dr. Pitojo Budiono, M.Si selaku Pembimbing utama Tesis terima kasih banyak atas kesediannya yang dengan sabar memberikan bimbingan, saran, kritik serta motivasi yang membangun agar dapat memberikan yang terbaik dalam proses penyelesaian tesis ini,
6. Bapak Drs. Ismono Hadi, M.Si selaku Pembimbing Pembantu Tesis terima kasih atas kesediannya yang dengan sabar memberikan bimbingan, saran, kritik serta motivasi dalam proses penyelesaian tesis ini
7. Seluruh Jajaran Dosen Pengajar di Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung
8. Seluruh Staf Administrasi di Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung dan Karyawan TU Fisip Unila yang membantu dan melayani urusan administrasi perkuliahan,
9. Bapak Kepala Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung dan seluruh Staf jajarannya terima kasih atas bantuannya yang telah memberikan informasi dan data sehingga tesis ini dapat terselesaikan,
10. Bapak Lurah Sukamenanti Baru dan seluruh Staf jajarannya terima kasih atas bantuannya yang telah memberikan informasi dan data sehingga tesis ini dapat terselesaikan,
11. Kepada Orang Tua, Bapak Ir. Ibnu Suud dan Ibu Dra. Tarmiati yang selalu memberikan semangat untuk selalu menjadi yang terbaik dan yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan serta mendidik dengan penuh ketulusan sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

12. Kepada Abang Robert, Abang Tan, Rara dan Novia, terima kasih atas segala nasihat serta saran yang memotivasi untuk terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi,
13. Kepada seluruh mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan angkatan 2015, terima kasih sudah menjadi keluarga baru, dan terima kasih atas kebersamaannya semoga silaturahmi tetap terjaga dengan baik.
14. Semua responden yang telah memberikan informasi dan bantuan kepada Penulis,

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga tesis yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung,

Penulis

Riri Rianiti

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kegunaan Penelitian	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kebijakan	16
1. Tinjauan Tentang Kebijakan	16
2. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik	17
B. Implementasi Kebijakan	19
Konsep Implementasi	19
C. Perumahan dan Permukiman Kumuh	24
1. Tinjauan Tentang Kumuh	26
2. Tinjauan Tentang Kawasan Kumuh	27
D. Kerangka Pikir	30
E. Hipotesis	34
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	35
B. Definisi Konseptual	36
C. Definisi Operasional	38
D. Lokasi Penelitian	42
E. Jenis Data	43
F. Populasi dan Sample	45
G. Penentuan Responden	50
H. Teknik Pengumpulan Data	50

I. Teknik Pengolahan Data.....	52
J. Teknik Penentuan Skor.....	53
K. Uji Instrumen Penelitian.....	56
L. Teknik Analisis Data.....	58
M. Uji Hipotesis.....	61

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat.....	63
B. Letak Geografis.....	78
C. Struktur Organisasi Kelurahan.....	78
D. Tugas dan Fungsi Dinas Pengairan dan Permukiman.....	79
E. Lembaga Keswadayaan Masyarakat.....	80
F. Peta Administrasi Kelurahan Sukamenanti Baru.....	83
G. Tugas Pokok Kelurahan Sukamenanti Baru.....	83
H. Fungsi Kelurahan Sukamenanti Baru.....	84
I. Batas-batas Kelurahan Sukamenanti Baru.....	84
J. Potensi Kekayaan Alam.....	84

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	89
B. Karakteristik Responden Berdasarkan Identitas Responden.....	89
1. Identitas Responden Menurut Usia.....	90
2. Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin.....	92
3. Identitas Responden Menurut Tingkat Pendidikan.....	93
4. Identitas Responden Menurut Pekerjaan.....	95
C. Uji Validitas dan Reliabilitas.....	99
1. Uji Validitas.....	104
2. Uji Reliabilitas.....	105
D. Deskripsi Data Variabel.....	112
1. Deskripsi Variabel Implementasi (X).....	112
2. Variabel Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh (Y).....	165
E. Pembahasan.....	189
1. Berdasarkan Kesimpulan Jawaban Responden.....	189
2. Berdasarkan Uji Korelasi.....	206
3. Berdasarkan Uji Regresi Linear Sederhana.....	210
3. Uji Hipotesis.....	223

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....	225
B. Saran.....	226

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Jumlah Penduduk Sukamenanti Baru.....	2
2. Data Jumlah Penduduk 5 tahun terakhir	9
3. Data Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.....	10
4. Data Operasional Variabel X dan Y	41
5. Nilai Koefisien Korelasi	59
6. Penggunaan Lahan	67
7. Prasarana Air bersih.....	71
8. Sumber Air Bersih	85
9. Kualitas Air Minum	85
10. Mata Pencarian Pokok Masyarakat Sukamenanti Baru	86
11. Agama Masyarakat Sukamenanti Baru.....	87
12. Etnis Masyarakat Sukamenanti Baru	87
13. Data Penduduk berdasarkan Pendidikan.....	88
14. Data Penduduk berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin.....	88
15. Identitas Responden menurut Umur	90
16. Identitas Responden menurut Jenis Kelamin.....	92
17. Identitas Responden menurut Tingkat Pendidikan	94
18. Identitas Responden menurut Pekerjaan	95
19. Uji Validitas Variabel X1 Komunikasi Kebijakan	100
20. Uji Validitas Variabel X2 Sumber Daya pembangunan	100
21. Uji Validitas Variabel X3 Prilaku Birokrat	101
22. Uji Validitas Variabel X4 Struktur Birokrasi Kebijakan.....	102
23. Uji Validitas Variabel Y1 Fisik	103
24. Uji Validitas Variabel Y2 Non Fisik	103
25. Interval Koefisien.....	105
26. Uji Reliabilitas Variabel X1 Komunikasi Kebijakan.....	105
27. Hasil cronbach's alpa variabel komunikasi kebijakan.....	105
28. Uji Reliabilitas Variabel X2 Sumber Daya Pembangunan	106
29. Hasil cronbach's alpa variabel komunikasi kebijakan.....	106
30. Uji Reliabilitas Variabel X3 Prilaku Birokrat.....	107
31. Hasil cronbach's alpa variabel prilaku birokrat	107
32. Uji Reliabilitas Variabel X4 Struktur Birokrasi Kebijakan	108
33. Hasil cronbach's alpa variabel Struktur Birokrasi Kebijakan.....	108
34. Uji Reliabilitas Variabel Y1 Fisik.....	109
35. Hasil cronbach's alpa variabel Fisik	109

36. Uji Reliabilitas Variabel Y2 Non Fisik.....	110
37. Hasil cronbach's alpa variabel Non Fisik	110
38. Pesan dari sosialisasi.....	113
39. Proses dari sosialisasi.....	114
40. Proses dalam memberikan sosialisas	116
41. Kebijakan meningkatkan kenyamanan di lingkungan masyarakat.....	117
42. Kebijakan peningkatan sistem drainase	118
43. Kebijakan peningkatan kondisi lingkungan.....	120
44. Penyampaian kebijakan kepada masyarakat.....	121
45. Penyampaian kebijakan berdasarkan norma.....	122
46. Kesesuaian kebijakan terhadap harapan masyarakat	124
47. Kebijakan dilaksanakan oleh aparatur yang professional.....	126
48. Kebijakan tidak mampu memberikan alternative solusi.....	128
49. kritik dan saran dari masyarakat	129
50. Pemberian dana kepada masyarakat kelurahan Sukamenanti Baru....	131
51. Ada pemberian dana yang langsung diberikan kepada masyarakat....	132
52. Masyarakat menerima kegiatan yang dibiayai Pemerintah Pusat.....	133
53. Perbaikan talud di sukamenanti baru	135
54. Pembangunan taman bermain (Ruang Terbuka Hijau).....	136
55. Tidak tersedia tempat pembuangan sampah Sementara	137
56. Disiplin waktu aparatur dari Dinas Pengairan dan Permukiman	139
57. Kesesuaian kelengkapan keselamatan aparatur	141
58. Pemahaman tugas pokok dan fungsi.....	142
59. Masyarakat tidak merespon positif hasil pembangunan	143
60. Masyarakat memberikan bantuan tenaga kepada aparatur Perbaikan jalan lingkungan.....	145
61. Kerusakan ekosistem lingkungan	146
62. Penolakan masyarakat terhadap pembayaran iuran bulanan	147
63. Pembatasan masyarakat dalam penggunaan air bersih	149
64. Pemberian sedikit lahan halaman rumah masyarakat	150
65. Penjelasan standar operasional prosedur kegiatan.....	153
66. Standar operasional prosedur kegiatan membuat efektif.....	154
67. Masyarakat memahami standar operasional prosedur	155
68. Kebijakan melibatkan unsur tokoh masyarakat	157
69. Kebijakan melibatkan unsur dari pihak DPRD Prov. Lampung.....	158
70. Kebijakan tidak melibatkan unsur organisasi kemasyarakatan	159
71. Informasi kepada masyarakat terkait tanggung jawab kegiatan	160
72. Tanggung jawab terhadap kegiatan oleh Dinas PU	162
73. Masa pemeliharaan setelah seluruh pembangunan selesai	163
74. Kebijakan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat	166
75. Perbaikan rumah tidak layak huni.....	167
76. Penyediaan aula terbuka	168
77. Perbaikan sistem drainase dilingkungan.....	169
78. Kondisi drainase pasca diperbaiki	171
79. Proses perbaikan drainase merusak halaman rumah masyarakat	172
80. Kondisi jalan lingkungan sukamenanti baru.....	173
81. Proses perbaikan jalan lingkungan.....	174

82. Perbaikan jalan lingkungan tidak merata.....	174
83. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan.....	176
84. Pembentukan kelompok swadaya masyarakat.....	178
85. Kelompok swadaya masyarakat tidak memiliki hak	180
86. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan kaidah	181
87. Sosialisasi masyarakat terkait pedoman Ruang Terbuka Hijau.....	182
88. Informasi terkait kriteria permukiman kumuh prioritas.....	184
89. Kesempatan untuk konsultasi	185
90. Proses penyuluhan dampak negative perumahan kumuh	186
91. Aparatur bersikap tidak cepat tanggap dalam mengatasi masalah.....	188
92. Kesimpulan Jawaban Responden pada variabel X1	189
93. Kesimpulan Jawaban Responden pada variabel X2	193
94. Kesimpulan Jawaban Responden pada variabel X3	198
95. Kesimpulan Jawaban Responden pada variabel X4	202
96. Hasil Uji Korelasi Komunikasi Kebijakan	206
97. Hasil Uji Korelasi Sumber Daya Pembangunan.....	207
98. Hasil Uji Korelasi Prilaku Birokrat.....	208
99. Hasil Uji Korelasi Struktur Birokrasi Kebijakan.....	209
100. Koefisien Komunikasi Kebijakan.....	210
101. Hasil regresi Komunikasi Kebijakan	211
102. Koefisien Sumber Daya Pembangunan	213
103. Hasil regresi Sumber Daya Pembangunan.....	214
104. Koefisien Prilaku Birokrat	216
105. Hasil regresi Prilaku Birokrat	217
106. Koefisien Struktur Birokrasi Kebijakan.....	218
107. Hasil regresi Struktur Birokrasi Kebijakan.....	219

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar

1. Kerangka Pikir	33
2. Peta Kelurahan Sukamenanti Baru	64
3. Kondisi Lingkungan Sukamenanti tahun 2013	65
4. Tipologi Permukiman di Kawasan Prioritas	67
5. Jalan Lingkungan Sukamenanti Baru.....	68
6. Contoh Kondisi Rumah di Kelurahan Sukamenanti Baru	69
7. Kondisi Jalan Prioritas di Kelurahan Sukamenanti Baru	70
8. Kondisi Jalan tanpa sistem drainase.....	72
9. Kawasan Serapan Air di Sukamenanti Baru	75
10. Drainase Alami di Kawasan Prioritas	76
11. Kemiringan Kawasan Permukiman.....	77
12. Struktur Birokrasi Kelurahan Sukamenanti Baru	78
13. Peta Administrasi Kelurahan Sukamenanti Baru	83
14. Sosialisasi Dinas Pengairan dan Permukiman Prov. Lampung	193
15. Taman bermain anak-anak (Ruang Terbuka Hijau)	196
16. Tempat penampungan air	197
17. Pengawasan dalam kegiatan bedah rumah	200
18. Pengawasan dalam pembangunan sistem drainase	202
19. Kondisi Rumah sebelum mendapatkan program bedah rumah	205
20. Kondisi rumah pasca mendapatkan program bedah rumah	205

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia tidak pernah lepas dari segala masalah yang berhubungan dengan tempat di mana bernaung dan tinggal dalam kehidupannya sehari-hari. Bagi manusia tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar (*basic need*) disamping kebutuhannya akan pangan dan sandang. Pemenuhan kebutuhan rumah bagi setiap keluarga (*shelter for all*) dan pengembangan perumahan yang berkelanjutan (*sustainable housing development*) sudah menjadi agenda global yang harus diwujudkan oleh setiap negara. Persoalan lain yang sangat mendasar adalah pemenuhan kebutuhan rumah yang terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Perwujudan pembangunan perumahan dan permukiman berkelanjutan, tidak dapat dilepaskan dari pembangunan perkotaan secara keseluruhan, apalagi bila dikaitkan dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan diimbangi dengan ketersediaan lahan yang merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan.

Seiring dengan berjalannya pembangunan, diikuti juga dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, sedangkan jumlah ketersediaan lahan untuk permukiman yang tetap, maka tidak jarang menyebabkan pada lokasi permukiman yang dekat dengan pusat kegiatan akan timbul beberapa titik konsentrasi permukiman hunian yang padat. Hal tersebut sesuai dengan pra riset yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 3 Oktober 2016 pukul 09.00 WIB di Kantor Kelurahan Sukamenanti baru, bahwa jumlah penduduk di Sukamenanti Baru jika dibandingkan dengan luas wilayah yang ada yaitu 19 hektar akan menemukan hasil bahwa ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan luas wilayah yang ada, hal tersebut didukung dengan data jumlah penduduk di kelurahan sukamenanti baru, yaitu :

Tabel 1 : Data Jumlah Penduduk Kelurahan Sukamenanti Baru

No.	RW / Lingkungan	Luas Wilayah (Ha)	RT	Jumlah Penduduk (jiwa)			Jumlah KK	
				Laki	Wanita	Total	Total KK	KK Miskin
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	I	2	RT 01	243	168	472	80	65
		4,13	RT 02	211	133	553	61	4
		3	RT 03	203	165	398	67	31
		3,33	RT 04	229	140	366	78	40
		2,07	RT 05	241	141	382	87	48
		1,2	RT 06	176	71	447	41	21
	Total penduduk LK I					2618		
2	II	2,3	RT 01	318	224	592	124	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4,7	RT 02	496	191	481	103	55
		4,38	RT 03	510	217	477	99	66
		4,4	RT 04	301	193	403	96	72
	Total penduduk LK II					1953		
	Jumlah	31,51		2928	1643	4571	834	439

Sumber: Dokumen Kelurahan Sukamenanti Baru Tahun 2015

Kepadatan penduduk dapat dilihat dengan rumus demografi yaitu jumlah penduduk dibagi luas wilayah, berdasarkan hal tersebut berarti kelurahan sukamenanti baru memiliki kepadatan penduduk 24,058 km². Permukiman hunian yang padat ini menimbulkan kesan kumuh bagi lingkungan sekitarnya. Peningkatan jumlah penduduk di perkotaan merupakan gejala umum yang terjadi di Indonesia. Sebagian masyarakat miskin di perkotaan memiliki keterbatasan sehingga menempati hunian dengan kualitas yang tidak memenuhi persyaratan teknis, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat No. 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang menjadi beberapa indikator pemukiman kumuh yaitu ketidakteraturan bangunan, hal ini didukung dengan dokumen dari Konsultan Kegiatan PLPBK (Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas) yang menunjukkan dokumentasi gambar terkait keadaan titik 0 dan gambar 100% kegiatan sudah berjalan, ketidakteraturan bangunan tidak sesuai dengan standar rencana tata ruang wilayah. Kemudian kualitas bangunan yang

ada pada Kelurahan Sukamenanti Baru juga tidak sesuai dengan persyaratan teknis, seperti standar rumah yang layak huni oleh masyarakat, hal ini didukung dengan adanya program terkait bedah rumah warga melalui kegiatan Peningkatan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas, hal ini untuk mengikuti standar kesesuaian Peraturan dari Pemerintah.

Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan dalam menyediakan lahan permukiman beserta prasarana dan sarana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan daya dukung lingkungan. Berdasarkan hasil pra riset yang dilakukan peneliti di Kantor Konsultan PLPBK (Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas) pada tanggal 3 Oktober 2016 pukul 13.00 WIB, terdapat beberapa sarana dan prasarana yang menjadi objek perbaikan, yaitu:

1. Pembangunan drainase penanggulangan banjir
2. Bedah rumah tidak layak huni menjadi rumah sehat
3. Pembangunan paving jalan lingkungan
4. Talud pencegah bencana longsor
5. Fasilitas tangga serta pemenuhan air bersih akan memenuhi kebutuhan warga miskin di kawasan prioritas.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengantisipasi dengan di dukung adanya peraturan guna menjamin hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang layak. Pertambahan penduduk di suatu daerah memiliki dua sisi berbeda, yaitu ada sisi dimana satu pihak merupakan suatu modal pembangunan, karena terdapat

angkatan kerja sesuai perkembangan penduduk tersebut, sedangkan di lain pihak akan menjadi beban pemerintah karena setiap jiwa akan membutuhkan kebutuhan hidup, seperti sandang, pangan, papan kemudian penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat. Persebaran penduduk yang tidak merata menimbulkan beberapa masalah, diantaranya kelebihan penduduk di suatu titik tertentu, dan didukung dengan faktor ketidakteraturan rencana tata ruang wilayah yang ada disuatu permukiman masyarakat.

Perkembangan penduduk kota-kota di Indonesia baik sebagai akibat pertumbuhan penduduk maupun akibat urbanisasi telah memberikan indikasi adanya masalah perkotaan yang serius, diantaranya adalah timbulnya permukiman kumuh, seperti yang terjadi di Kota Bandar Lampung yang memiliki cukup luas wilayah yang dikatakan kumuh, hal ini didukung dengan data dari salah satu media cetak bahwa “Kawasan kumuh saat ini masih ada di Kota Bandar Lampung luasnya mencapai Dua Ratus Enam Puluh Enam Hektar ” (www. Radartvnews.com pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 13.15 WIB)

Seiring dengan pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan, kebutuhan akan perumahan, penyediaan prasarana dan sarana permukiman akan meningkat pula, baik melalui peningkatan maupun adanya pembangunan baru. Kurang siapnya Pemerintah Kota dengan sistem perencanaan dan pengelolaan kota yang tepat dalam mengantisipasi penambahan penduduk dengan berbagai motif dan keragaman, nampaknya menjadi penyebab utama yang memicu timbulnya permasalahan permukiman.

Pemenuhan akan kebutuhan prasarana dan sarana pemukiman baik dari segi perumahan maupun lingkungan permukiman yang terjangkau dan layak huni belum sepenuhnya dapat disediakan oleh masyarakat sendiri maupun pemerintah. Kemudian daya dukung prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang ada mulai menurun dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi terjadinya permukiman kumuh.

Persoalan permukiman merupakan masalah yang serius karena dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya kantong-kantong kemiskinan yang fatal dan kemudian menyebabkan lahirnya berbagai persoalan sosial di luar kontrol atau kemampuan pemerintah kota untuk menangani dan mengawasinya, hal ini didukung dengan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung yaitu:

Jumlah penduduk miskin di Lampung pada Maret 2015 mencapai 1.163,49 ribu orang (14,35 persen), bertambah 19,6 ribu orang (0,14 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2014 yang sebesar 1.143,93 ribu orang (14,21 persen). (Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung Tahun 2015)

Kemiskinan dan permukiman kumuh merupakan suatu keterkaitan sebab akibat, permukiman kumuh merupakan salah satu masalah sosial di Indonesia yang tidak mudah untuk diatasi. Beragam upaya dan program dilakukan untuk mengatasinya, namun masih saja banyak kita jumpai permukiman masyarakat miskin di hampir setiap sudut kota yang disertai dengan ketidaktertiban tata ruang wilayah di perkotaan. Masyarakat miskin di perkotaan itu unik dengan berbagai problematika sosialnya sehingga perlu mengupas akar masalah dan merumuskan solusi terbaik bagi kesejahteraan mereka, dapat dijelaskan bahwa

bukanlah kemauan mereka untuk menjadi sumber masalah bagi kota namun karena faktor-faktor ketidakmampuan yang membuat mereka terpaksa menjadi ancaman bagi eksistensi kota yang mensejahterahkan.

Keluhan yang paling sering disampaikan mengenai permukiman masyarakat miskin tersebut adalah rendahnya kualitas lingkungan seperti yang dianggap sebagai bagian kota yang mesti disingkirkan. Rendahnya kualitas lingkungan ini dapat dicontohkan seperti tidak adanya keseimbangan antara pemanfaatan ruang kota, penataan ruang kawasan perkotaan menjadi isu penting ketika pertumbuhan penduduk semakin tinggi. Penyediaan kawasan hunian, fasilitas umum dan sosial serta ruang-ruang terbuka publik (*Open Space*) yang meliputi ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka non hijau (RTNH) di perkotaan merupakan unsur-unsur penting dalam penataan ruang kota (www.biropembangunan.lampungprov.go.id diakses pada 26 November 2016 Pukul 20.00 WIB).

Terbentuknya permukiman kumuh, yang sering disebut sebagai *slum area* sering dipandang potensial menimbulkan banyak masalah perkotaan. Dalam rangka pembangunan meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat melalui perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur dibutuhkan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan, strategi, serta pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis.

Salah satu kebijakan Pemerintah untuk merespon dari masalah ini yaitu adanya Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) pada dasarnya adalah kebijakan ini merupakan kelanjutan dari transformasi sosial Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Beberapa prinsip dasar yang digunakan di P2KP seperti demokrasi, partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan desentralisasi, juga menjadi prinsip dasar PLPBK. Dalam P2KP, termasuk juga dalam PLPBK, pembangunan manusia adalah fokus utama dalam penanggulangan kemiskinan, melalui pembangunan bidang sosial, ekonomi dan lingkungan (*SEL*). Intervensi kegiatan PLPBK difokuskan pada kegiatan penataan lingkungan permukiman miskin di perkotaan melalui pendekatan Tridaya secara komprehensif dan terpadu. Lingkungan permukiman tersebut ditata kembali menjadi lingkungan permukiman yang teratur, aman, dan sehat dalam rangka mendukung upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat miskin.

PLPBK merupakan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur yang mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan menjadi media belajar bersama antara masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli atau pemangku kepentingan dalam memperkuat kemandirian pengelolaan lingkungan permukiman ditingkat kelurahan.

Tidak seimbangannya pertumbuhan penduduk dengan ketersediaan lahan merupakan salah satu faktor penyebab dari perumahan dan permukiman kumuh. Seperti yang terjadi di Kota Bandar Lampung, pertumbuhan penduduk terjadi sangat pesat, hal ini sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi

Lampung tentang kependudukan di 4 tahun terakhir yaitu:

Tabel 2 : Data Jumlah Penduduk 5 tahun terakhir

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	
		2010	2014	2015	2010-2015	2014-2015
1.	Lampung Barat	278.189	290 388	293 105	5,36	0,94
2.	Tanggamus	538.418	567 172	573 904	6,59	1,19
3.	Lampung Selatan	915.463	961 897	972 579	6,24	1,11
4.	Lampung Timur	954. 694	998 720	1 008 797	5,67	1,01
5.	Lampung Tengah	1.174.534	1 227 185	1 239 096	5,50	0,97
6.	Lampung Utara	585.973	602 727	606 092	3,43	0,56
7.	Way Kanan	407.525	428 097	432 914	6,23	1,13
8.	Tulang Bawang	399.291	423 710	429 515	7,57	1,37
9.	Pesawaran	400.208	421 497	426 389	6,54	1,16
10.	Pringsewu	366.615	383 101	386 891	5,53	0,99
11.	Mesuji	188.030	194 282	195 682	4,07	0,72
12.	Tulang Bawang Barat	251.489	262...316	264 712	5,26	0,91
13.	Pesisir Barat	142.228	148.412	149 890	5,39	1,00
14.	Bandar Lampung	885.363	960.695	979 287	10,61	1,94
15.	Metro	145.985	155.992	158 415	8,51	1,55

Sumber : Proyeksi Penduduk Provinsi Lampung 2010–2035, BPS Provinsi Lampung

Berdasarkan data pada tabel 2 terlihat dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat melalui pemukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur dibutuhkan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, maka pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah serta pemerintah kota untuk merealisasikan segala kebijakan terkait peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat No. 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Indonesia, selanjutnya melanjutkan kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait Peraturan

Menteri, maka implementasi di Kota Bandar Lampung berlandaskan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung No.974/IV.32/HK/2014 Tentang Penetapan Wilayah yang Dikategorikan Kumuh, yaitu :

Tabel 3. Data Lokasi Perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh di Bandar Lampung

No	Nama Lokasi	Luas (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF	
			Kelurahan	Kecamatan
1	2	3	4	5
1.	Kota karang raya	16,60	Kota karang raya	Teluk Betung Timur
2.	Kota karang	20,00	Kota karang	Teluk Betung Timur
3.	Gedung pakuon	6,58	Gedung pakuon	Teluk Betung Selatan
4.	Negeri olok gading	6,00	Negeri olok gading	Teluk Betung Selatan
5.	Talang	9,42	Talang	Teluk Betung Selatan
6.	Kangkung	21,03	Kangkung	Bumi Waras
7.	Bumi waras	14,46	Bumi waras	Bumi Waras
8.	Sukaraja	42,50	Sukaraja	Bumi Waras
9.	Bumi Raya	8,64	Bumi raya	Bumi Waras
10.	Ketapang	2,00	Ketapang	Panjang
11.	Way lunik	0,66	Way lunik	Panjang
12.	Pidada	6,63	Pidada	Panjang
13.	Panjang Utara	0,69	Panjang utara	Panjang
14.	Karang Maritime	2,00	Karang maritime	Panjang
15.	Srengsem	1,50	Srengsem	Panjang
16.	Sukajaya Baru	12,51	Sukajaya baru	Tanjung Karang barat
17.	Palapa	7,49	Palapa	Tanjung Karang Pusat
18.	Pasar Gantung	11,18	Pasar gantung	T. Karang Pusat

1	2	3	4	5
19.	Kaliawi Persada	3,18	Kaliawi persada	T. Karang Pusat
20.	Kebon jeruk	20,08	Kebon jeruk	Tanjung Karang Timur
21.	Sawah lama	10,78	Sawah lama	Tanjung Karang Timur
22.	Sawah brebes	7,12	Sawah brebes	Tanjung Karang Timur
23.	Sukamenanti Baru	31,51	Sukamenanti	Kedaton
24.	Gunung sulah	19,10	Gunung sulah	Way Halim
25.	Camping raya	5,06	Camping raya	Sukabumi

Sumber: Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung N0 974/ IV.32/HK/2016

Berdasarkan data yang tertera di tabel 3, daerah Sukamenanti Baru Kecamatan Kedaton merupakan salah satu daerah yang termasuk perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ada di Kota Bandar Lampung. Kemudian berdasarkan data yang di dapat dari Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung, khususnya bagian BANGKIM (Pengembangan Pemukiman) menjelaskan bahwa daerah Sukamenanti Baru sudah dilakukan tindakan perbaikan pemukiman yang berjalan dari 2015 berakhir selesai kegiatannya 100 % pada Maret Tahun 2016 . Fenomena yang terjadi saat ini, di Provinsi Lampung khususnya Ibu Kota Bandar Lampung sudah dikategorikan sebagai daerah yang termasuk kawasan permukiman berkepadatan tinggi, seperti yang disampaikan oleh Badan Perencanaan Daerah Provinsi Lampung bahwa:

“Kawasan permukiman berkepadatan tinggi diarahkan di, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Pringsewu” (www.bappeda.lampungprov.go.id, diakses pada tanggal 05 Oktober 2016 pukul 19.30 WIB)

Berdasarkan data tersebut memberikan penjelasan bahwa Kota Bandar Lampung sudah memasuki klasifikasi permukiman berkepadatan tinggi, yang dimana jumlah penduduk setiap tahunnya terus meningkat. Tentu saja hal ini memiliki dampak dimana semakin padatnya penduduk yang ada di Kota Bandar Lampung, maka secara tidak langsung, maka masalah tentang perumahan kumuh dan permukiman kumuh akan menjadi masalah yang harus di hadapi bagi Pemerintah Provinsi Lampung maupun Pemerintah Kota Bandar Lampung itu sendiri.

Maka dapat disimpulkan bahwa masalah perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan masalah yang besar dan harus cepat mendapat respon dalam penyelesaiannya, hal ini dibuktikan dengan beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas tentang penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang sesuai dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: Penelitian oleh Niken Fitria dan Rulli Pratiwi Setiawan pada tahun 2014 dengan judul Identifikasi Karakteristik Lingkungan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat. Pada fokus hasil penelitian ini membahas mengenai tahapan identifikasi karakteristik lingkungan permukiman kumuh yang terdapat di masing-masing tingkat kekumuhan yang terdapat di Kelurahan Kapuk, karakteristik yang dimiliki oleh permukiman kumuh di wilayah studi yang ditinjau dari 5 aspek, yaitu kondisi fisik, ekonomi, ketersediaan sarana dan prasarana, sosial, dan juga bahaya (*hazard*).

Kemudian penelitian Erick Sulestianson pada tahun 2014 dengan judul Penanganan Permukiman Kumuh Dengan Pendekatan Karakteristik dan Faktor

Penyebab Kekumuhan (Studi Kasus Permukiman Kumuh di Kelurahan Tamansari dan Kelurahan Braga), dalam penelitian ini fokus hasil penelitiannya membahas faktor yang diduga menyebabkan kekumuhan pada kawasan studi adalah faktor padatnya penduduk pada lingkungan perumahan, rendahnya pendapatan masyarakat, kurangnya kepedulian masyarakat, kepadatan bangunan yang tinggi, kondisi prasarana yang buruk, kepemilikan lahan oleh pemerintah, adanya kegagalan kebijakan.

Model penanganan yang sesuai adalah model *Slum Upgrading* yang memiliki kesamaan dengan peremajaan kota dengan melakukan konsolidasi lahan yang disesuaikan dengan kondisi kawasan studi, dan yang terakhir adalah penelitian yang penulis teliti dengan judul Pengaruh Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat No.02/PRT/M/2016 Terhadap Kualitas Peningkatan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Studi pada Kelurahan Sukamenanti Baru Kecamatan Kedaton Bandar Lampung) dengan fokus penelitian membahas bagaimana pengaruh implementasi dari sebuah kebijakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat No. 02/PRT/M/2016 terhadap peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan menggunakan indikator komunikasi kebijakan, sumber daya pembangunan, perilaku birokrat, dan struktur birokrasi kebijakan.

Perbedaannya dengan hasil penelitian ini adalah bahwa hasil penelitian ini lebih memfokuskan apakah ada pengaruh dalam implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah terhadap peningkatan kualitas perumahan kumuh dan

permukiman kumuh di Provinsi Lampung dengan penanganan masalah dilihat dari persepektif komunikasi kebijakan, sumber daya pembangunan, perilaku birokrat dan struktur birokrasi kebijakan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pengaruh Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat No. 02/PRT/M/2016 Terhadap Kualitas Peningkatan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Studi Pada Kelurahan Sukamenanti Baru Kecamatan Kedaton Bandar Lampung).

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Apakah ada Pengaruh Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat No. 02/PRT/M/2016 Terhadap Kualitas Peningkatan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas di Kelurahan Sukamenanti Baru Kecamatan Kedaton Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Pengaruh Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat No 02/PRT/M/2016 Terhadap Kualitas Peningkatan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Di Kelurahan Sukamenanti Baru Kecamatan Kedaton Bandar Lampung

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk lebih mengembangkan ilmu tata kelola atau manajemen Pemerintah Perkotaan, khususnya bidang perumahan dan permukiman

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung dan Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan lagi kinerja dalam melaksanakan suatu kebijakan publik. Kemudian untuk pihak lainnya dapat mengetahui informasi-informasi lebih banyak mengenai indeks perumahan dan permukiman yang sehat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Kebijakan

1. Kebijakan

Pemerintah dalam peningkatan pelayanan publik terdapat beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah. dalam menanggulangi masalah peningkatan kualitas permukiman kumuh di Indonesia, maka Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan publik terkait dengan masalah permukiman kumuh yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan pemerintah pusat ingin mulai membenahi permukiman kumuh yang dapat menyebabkan beberapa dampak buruk, maka yang diharapkan dari adanya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat No.02/PRT/M/2016 adalah dapat meningkatkan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh yang ada di Indonesia. Kebijakan dalam hal ini biasa juga disebut sebagai kebijaksanaan. Kebijaksanaan Menurut Amara Raksasataya dalam Nugroho (2009:178) adalah sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Siagian (2008:79) dalam proses pengolahan Pembangunan Nasional, bahwa :

“Kebijakan adalah serangkaian keputusan yang sifatnya mendasar untuk dipergunakan sebagai landasan bertindak dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan sebelumnya”

Kesimpulannya bahwa kebijakan adalah suatu rangkaian keputusan yang telah ditetapkan dengan cara yang terbaik untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelum kebijakan tersebut diambil. Secara garis besar ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan, yaitu :

1. Adanya pengaruh tekanan dari luar
2. Adanya pengaruh kebiasaan lama (*konservatisme*)
3. Adanya pengaruh sifat pribadi
4. Adanya pengaruh dari kelompok luar
5. Adanya pengaruh keadaan masa lalu .

2. Kebijakan Publik

Pada kehidupan modern seperti sekarang ini, kita tidak dapat lepas dari apa yang disebut dengan Kebijakan Publik. Kebijakan-kebijakan tersebut kita temukan dalam bidang kesejahteraan sosial, perumahan rakyat, pembangunan ekonomi, dan lain sebagainya. Salah satu defenisi yang diberikan oleh Alam (2012 : 157) tentang kebijakan public adalah secara luas kebijakan publik dapat didefenisikan sebagai hubungan suatu unit Pemerintah dengan lingkungannya. Selanjutnya Carl Fried dalam Abidin (2012:128) memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-

hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Selain itu, gagasan bahwa kebijakan mencakup perilaku yang mempunyai maksud yang layak mendapat perhatian dan sekaligus harus dilihat sebagai bagian definisi kebijakan publik yang penting.

Proses kebijakan dapat dilukiskan sebagai tuntunan perubahan dalam perkembangan menyiapkan, menentukan, melaksanakan dan mengendalikan suatu kebijakan. Dengan kata lain bahwa proses adalah merupakan keseluruhan tuntunan peristiwa dan perbuatan dinamis. Definisi lain mengatakan bahwa kebijakan publik pun ditawarkan oleh Dunn (2003 : 89) yang mengatakan bahwa:

“Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan, dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”

Kemudian dalam kaitannya dengan definisi tersebut maka dapat disimpulkan

beberapa karakteristik utama suatu definisi kebijakan publik, yaitu :

- a. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya diitujukan pada tindakan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu
- b. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah

- c. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan publik melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan, secara negatif kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.
- d. Kebijakan publik paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

B. Implementasi Kebijakan

a. Konsep Implementasi

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivat* atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat. Adapun makna implementasi

menurut Sabatier (1979:101) sebagaimana dikutip dalam buku Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa:

“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Tahapan implementasi sebuah kebijakan merupakan tahapan yang krusial, karena tahapan ini menentukan keberhasilan sebuah kebijakan. Sehingga ada beberapa ahli yang berpendapat implementasi kebijakan dikatakan dari beberapa persepektif, salah satunya teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn yang dikutip dalam buku Nugroho (2009:627) bahwa beliau mengatakan konsep implementasi kebijakan dapat dilihat dari beberapa variabel, yaitu:

1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi
2. Karakteristik agen pelaksana atau implementator
3. Kondisi ekonomi , sosial, dan politik
4. Kecenderungan (*disposition*) pelaksana / implementator

Pada model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Kemudian menurut Goggin, Bowman, dan Lester yang dikutip dalam buku Nugroho (2009 : 633) mengatakan implementasi kebijakan dikembangkan secara ilmiah dengan mengedepankan pendekatan metode penelitian dengan

adanya *independen*, *intervening*, dan *dependen* kemudian meletakkan unsur komunikasi sebagai penggerak dalam sebuah implementasi kebijakan. Tahapan implementasi perlu dipersiapkan dengan baik pada tahap perumusan dan pembuatan kebijakan, kemudian pada saat implementasi kebijakan merupakan tahap krusial yang dimana seseorang harus benar-benar melihat berbagai persepektif yang ada dalam implementasi suatu kebijakan.

Rangkaian tindakan yang diambil tersebut merupakan bentuk transformasi rumusan-rumusan yang diputuskan dalam kebijakan menjadi pola-pola operasional yang pada akhirnya akan menimbulkan perubahan sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan yang telah-diambil sebelumnya. Hakikat utama implementasi adalah pemahaman atas apa yang harus dilakukan setelah sebuah kebijakan diputuskan. Dalam pandangan George C. Edwards yang dikutip dalam buku Nugroho (2009 : 836), Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu:

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok-sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan,

mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Oleh karena itu diperlukan adanya tiga hal, yaitu : (1) penyaluran (*transmisi*) yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula, (2) adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan dan (3) adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan. Jika yang dikomunikasikan berubah-ubah akan membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan.

2. Sumber Daya

Pada pelaksanaan implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya baik sumber daya manusia, material dan metoda. Sasaran, tujuan, dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif dan efisien.

3. Disposisi

Merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor

kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis.

4. Struktur Birokrasi

Merupakan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik, yang bertugas mengimplementasikan Tahapan ini tentu saja melibatkan seluruh *stakeholder* yang ada, baik sektor swasta maupun publik secara kelompok maupun individual. Implementasi kebijakan meliputi tiga unsur yakni tindakan yang diambil oleh badan atau lembaga administratif; tindakan yang mencerminkan ketaatan kelompok target serta jejaring sosial politik dan ekonomi yang mempengaruhi tindakan para *stakeholder* tersebut. Interaksi ketiga unsur tersebut pada akhirnya akan menimbulkan dampak, baik dampak yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan.

Keempat faktor tersebut secara simultan bekerja dan berinteraksi satu sama lain agar membantu proses implementasi atau sebaliknya menghambat proses implementasi. 4 faktor tersebut menjadi faktor pendukung agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif. Implementasi sebuah kebijakan secara konseptual bisa dikatakan sebagai sebuah proses pengumpulan sumber daya Alam dan Sumber Daya Manusia dan diikuti dengan penentuan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan kebijakan.

C. Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat No. 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Perumahan kumuh merupakan perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Kemudian pengertian permukiman kumuh dapat diartikan sebagai bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Permukiman memberikan kesan tentang pemukim atau kumpulan pemukim beserta sikap dan perilakunya di dalam lingkungan, sehingga permukiman menitik beratkan pada sesuatu yang bukan bersifat fisik atau benda mati yaitu manusia (*human*). Adapun kriteria permukiman kumuh sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat No 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan kualitas permukiman kumuh pada Bab 4 pasal 4 ayat 2 yaitu :

a. Bangunan gedung

- (a) Rehabilitasi dengan perbaikan atau penambahan terhadap komponen bangunan agar memenuhi standar konstruksi dan persyaratan teknis bangunan gedung.
- (b) Rekonstruksi dengan membongkar dan membangun kembali bangunan atau sarana, prasarana, dan utilitas umum dengan

penambahan komponen atau fungsi.

- (c) Penataan kawasan dengan pengaturan petak bangunan
 - (d) Penambahan dan Penyediaan sarana permukiman (RTH, MCK umum)
 - (e) Penyediaan hunian sementara untuk masyarakat terdampak
- b. Jalan lingkungan
- (a) Rehabilitas jalan untuk peningkatan kapasitas jalan dengan penambahan bangunan pelengkap jalan
 - (b) Peningkatan struktur jalan
- c. Drainase lingkungan
- (a) Peningkatan kualitas unit sistem drainase
 - (b) Penyediaan sistem drainase
 - (c) Penambahan segmen jaringan agar terhubung dengan sistem drainase kota

Sehingga dengan demikian tumbuhnya permukiman kumuh merupakan akibat dari beberapa indikator penyebab, selain itu dikarenakan adanya faktor tingginya urbanisasi dan migrasi yang tinggi, masyarakat berbondong-bondong datang ke kota untuk mencari nafkah. Hidup di kota sebagai warga dengan mata pencarian terbanyak pada sektor informal. Pada dasarnya pertumbuhan sektor informal bersumber pada urbanisasi penduduk dari pedesaan ke kota, atau dari kota satu ke kota lainnya. Hal ini disebabkan oleh lahan pertanian di mana mereka tinggal, sudah terbatas, bahkan kondisi desa

pun tidak dapat lagi menyerap angkatan kerja yang terus bertambah, sedangkan yang migrasi dari kota ke kota lain, kota tidak lagi mampu menampung, karena lapangan kerja sangat terbatas. Akhirnya dengan adanya pemanfaatan ruang yang tidak terencana di beberapa daerah, terjadi penurunan kualitas lingkungan bahkan kawasan permukiman terutama di daerah perkotaan yang padat penghuni.

A. Tinjauan Kumuh

Kumuh adalah kesan atau gambaran secara umum tentang sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan kelas menengah. Dengan kata lain, kumuh dapat diartikan sebagai tanda atau cap yang diberikan golongan atas yang sudah mapan kepada golongan bawah yang belum mapan. Kumuh dapat ditempatkan sebagai sebab dan dapat pula ditempatkan sebagai akibat. Ditempatkan di mana pun juga, kata kumuh tetap menjurus pada sesuatu hal yang bersifat negatif. Pemahaman kumuh dapat ditinjau dari :

a. Sebab Kumuh

Menurut Hari Poerwanto (2010:59) mengatakan bahwa kumuh adalah kemunduran atau kerusakan lingkungan hidup dilihat dari:

(1) segi fisik, yaitu gangguan yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alam seperti air dan udara,

(2) segi masyarakat atau sosial, yaitu gangguan yang ditimbulkan oleh manusia sendiri seperti kepadatan lalu lintas, sampah.

b. Akibat Kumuh

Menurut Poerwanto (2010 : 62) mengatakan bahwa kumuh adalah akibat perkembangan dari gejala-gejala antara lain:

- (1) kondisi perumahan yang buruk,
- (2) penduduk yang terlalu padat,
- (3) fasilitas lingkungan yang kurang memadai,
- (4) budaya kumuh,
- (5) apatis dan isolasi

B. Kawasan Kumuh

Menurut Soemarwoto (1992 : 87) mengatakan kawasan kumuh adalah kawasan di mana rumah dan kondisi hunian masyarakat di kawasan tersebut sangat buruk. Rumah maupun sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya. Ciri-ciri permukiman kumuh, seperti yang diungkapkan Kuswartojo (1996 : 168) adalah:

1. Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai
2. Kondisi hunian rumah dan pemukiman serta penggunaan ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin.
3. Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada di pemukiman kumuh sehingga

mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya.

4. Penghuni permukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak *homogen*, warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat kepadatan yang beranekaragam, begitu juga asal muasalnya. Dalam masyarakat permukiman kumuh juga dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan atas kemampuan ekonomi mereka yang berbeda-beda tersebut.
5. Sebagian besar penghuni pemukiman kumuh adalah mereka yang bekerja di sektor informal atau mempunyai mata pencaharian tambahan di sektor informil

Menurut Kuswartojo (1996 : 113) ciri kampung atau permukiman kumuh terdiri dari:

- a. Penduduk sangat padat antara 250-400 jiwa/ha. Pendapat para ahli perkotaan (MMUDP,90) menyatakan bahwa apabila kepadatan suatu kawasan telah mencapai 80 jiwa/ha maka timbul masalah akibat kepadatan ini, antara perumahan yang dibangun tidak mungkin lagi memiliki persyaratan fisiologis, psikologis dan perlindungan terhadap penyakit.
- b. Jalan-jalan sempit tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda empat, karena sempitnya, kadang-kadang jalan ini sudah tersembunyi dibalik atap-atap rumah yang sudah bersinggungan satu sama lain.

- c. Fasilitas drainase sangat tidak memadai, dan malahan biasa terdapat jalan-jalan tanpa drainase, sehingga apabila hujan kawasan ini dengan mudah akan tergenang oleh air.
- d. Fasilitas pembuangan air kotor/tinja sangat minim sekali. Ada diantaranya yang langsung membuang tinjanya ke saluran yang dekat dengan rumah, ataupun ada juga yang membuangnya ke sungai yang terdekat.
- e. Fasilitas penyediaan air bersih sangat minim, memanfaatkan air sumur dangkal, air hujan atau membeli secara kalengan. Tata bangunan sangat tidak teratur dan bangunan-bangunan pada umumnya tidak permanen dan malahan banyak yang darurat.
- g. Kondisi a sampai f membuat kawasan ini sangat rawan terhadap penularan penyakit.
- h. Pemilikan hak atas lahan sering tidak legal, artinya status tanahnya masih merupakan tanah negara dan para pemilik tidak memiliki status apa-apa. Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, yang menyatakan bahwa:

“untuk mendukung terwujudnya lingkungan permukiman yang memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keandalan bangunan, suatu lingkungan permukiman yang tidak sesuai tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi, kualitas bangunan sangat rendah, prasarana lingkungan tidak memenuhi syarat dan rawan, yang dapat membahayakan kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni, dapat ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebagai lingkungan permukiman kumuh”

Seperti yang ada di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat No. 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas terhadap Permukiman Kumuh, khususnya bab 1 pasal 6 menyebutkan bahwa permukiman kumuh yaitu permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebuah permukiman dapat dikatakan sebagai permukiman kumuh jika lingkungan hunian atau tempat tinggal atau rumah beserta lingkungannya yang berfungsi sebagai rumah tinggal dan sebagai sarana pembinaan keluarga, tetapi tidak layak huni ditinjau dari tingkat kepadatan penduduk, sarana dan prasarananya, fasilitas pendidikan, kesehatan serta sarana dan prasarana sosial budaya masyarakat.

D. Kerangka Pikir

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya sesuai dengan yang diinginkan. Dalam upaya mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivat* atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program - program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah,

masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan-tujuan yang ingin diraih. Dalam konteks penelitian ini, untuk menangani masalah yang terjadi di masyarakat terkait permukiman kumuh yang terjadi di Kota Bandar Lampung, maka pemerintah memiliki peran untuk menyelesaikan masalah yang ada, salah satunya dengan mengeluarkan suatu kebijakan publik dengan produk hukum untuk khusus menangani masalah peningkatan kualitas permukiman kumuh yang terjadi, yaitu dengan adanya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat No 02/PRT/M/2016 Tentang peningkatan kualitas Permukiman kumuh. Implementasi kebijakan ini menggunakan 4 indikator yaitu : Komunikasi Kebijakan, sumber daya pembangunan, perilaku birokrat dan struktur birokrasi Kebijakan, dengan menggunakan indikator ini diharapkan dapat melihat bagaimana kualitas implementasi sebuah kebijakan dilaksanakan .

Masalah pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, sedangkan jumlah ketersediaan lahan untuk permukiman yang tetap, hal tersebut menjadi sebab akibat dari terus meningkatnya permukiman kumuh yang ada di Kota Bandar Lampung. Masalah permukiman yang terjadi di Bandar Lampung belakangan ini menjadi perhatian lebih oleh Pemerintah Pusat, khususnya Pemerintah Daerah Provinsi

Lampung. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat No 02/PRT/M/2016 Terhadap Kualitas Peningkatan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas lebih tepatnya di Kelurahan Sukamenanti Baru Kecamatan Kedaton Bandar Lampung.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dua variabel sehingga menggunakan format penelitian kuantitatif dengan metode eksplanasi survey, yang artinya penelitian yang menggunakan data yang sama dimana peneliti menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis, dan dapat menggambarkan suatu generalisasi. Jika dikaitkan dengan konteks penelitian ini, maka dikatakan eksplanasi karena dalam penelitian ini akan menjelaskan pengaruh variabel implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat No 02/PRT/M/2016 terhadap variabel kualitas peningkatan lingkungan permukiman berbasis komunitas. Penelitian eksplanasi tidak hanya sekedar memberikan gambaran mengenai suatu gejala sosial tertentu yang menjadi fokus perhatian yang ingin dijelaskan, tetapi juga bagaimana hubungannya dengan gejala sosial lainnya, dan mengapa hubungannya seperti itu.

Penelitian eksplanasi bertujuan untuk menjelaskan apa-apa yang akan terjadi bila variabel-variabel tertentu dikontrol atau dimanipulasi secara tertentu. Penelitian

ini dapat dikatakan sebagai penelitian pengujian hipotesis yang menguji hubungan sebab akibat diantara variabel yang diteliti, Bungin (2001:51).

Pendapat lain juga menjelaskan bahwa metode eksplanasi dirancang untuk menemukan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat kemudian data yang diperoleh diolah dan disusun sampai diperoleh kejelasan tentang hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Tujuan utama dalam penggunaan metode ini adalah untuk menghubungkan pola-pola yang berbeda namun memiliki keterkaitan dan menghasilkan pola hubungan sebab akibat, Prasetyo (2010 : 43).

Berdasarkan uraian di atas bahwa metode penelitian eksplanasi adalah penelitian yang mencari hubungan sebab akibat yang menggunakan variabel bebas dengan variabel terikat. Jadi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian eksplanasi, dimana hubungan sebab yakni dimana pengaruh implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat No 02/PRT/M/2016 akan berdampak terhadap kualitas peningkatan lingkungan permukiman berbasis komunitas di Sukamenanti Baru Kecamatan Kedaton Bandar Lampung.

B. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan definisi akademik atau yang mengandung pengertian universal untuk suatu kata atau kelompok kata. Pemaknaan dari konsep yang digunakan sehingga mempermudah peneliti untuk mengoperasionalkan konsep tersebut di lapangan. Adapun definisi konseptual pada penelitian ini adalah:

1. Implementasi Kebijakan merupakan suatu proses atau rangkaian kebijakan segera setelah penetapan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program Winarno (2012:147). Dalam konteks penelitian ini, yang menjadi dasar hukum dari sebuah kebijakan yaitu implementasi dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat No.02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
2. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Perumahan kumuh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perumahan kumuh yang berada di Sukamenanti Baru Kecamatan Kedaton Bandar Lampung
3. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat . Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah permukiman yang berada di Sukamenanti Baru Kecamatan Kedaton Bandar Lampung
4. Implementasi Peraturan terhadap sebuah kebijakan merupakan penelitian yang mengukur dua variabel. Hasil penelitian ini merupakan hubungan sebab akibat yang dapat diuraikan yakni jika sebuah peraturan sudah ditetapkan, maka apakah ada dampak pengaruhnya terhadap pelaksanaan sebuah kebijakan

pemerintah yang sudah ditetapkan sebelumnya, atau sebaliknya apakah tidak ada pengaruh dari adanya penetapan sebuah peraturan pemerintah terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah yang dilaksanakan

C. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dengan kata lain, definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel.

1. Implementasi

Penelitian ini penulis akan melihat bagaimana Pengaruh implementasi dari sebuah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat No 02/PRT/M/2016 Terhadap Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (*Variabel independent (X)*) dilihat dari konsep teori sebagai berikut:

Implementasi menurut pandangan George C. Edwards yang diikuti dalam Nugroho (2009:836) dipengaruhi oleh empat variable, yaitu:

a) Komunikasi

Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Oleh karena itu diperlukan adanya tiga hal, yaitu: (1) penyaluran (*transmisi*) yang baik akan menghasilkan

implementasi yang baik pula, (2) adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan dan (3) adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan. Jika yang dikomunikasikan berubah-ubah, maka akan membingungkan orang yang menerima pesan tersebut.

b) Sumber daya

Pada pelaksanaan implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya baik sumber daya manusia, material dan metoda. Sasaran, tujuan, dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif dan efisien.

c) Disposisi

Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis.

d) Struktur birokrasi

Organisasi menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukkan status relatifnya.

Kemudian dalam pelaksanaan penelitiannya variabel Y akan diukur dengan beberapa konsep operasional yaitu :

a. Fisik

Karakteristik fisik yang perlu dikaji antara lain terkait dengan pemanfaatan lahan pada kawasan, kecenderungan perkembangan permukiman dan kondisi sanitasi lingkungan pada kawasan, karakteristik bermukim penduduk terkait dengan pengaruh aspek sosial dan budaya misalnya perilaku maupun kondisi permukiman yang dipengaruhi oleh adat dan budaya lokal. Jadi dapat disimpulkan bahwa Infrastruktur merupakan fasilitas-fasilitas publik yang diadakan oleh pemerintah maupun swasta merujuk pada sistem fisik seperti jaringan jalan, air bersih, *drainase*, telekomunikasi, listrik, limbah, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi, contohnya dalam pemanfaatan potensi lahan kosong untuk pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi sebagai taman bermain anak dan penempatan MCK (mandi, cuci kakus).

b. Non fisik

Karakter non fisik dalam konteks penelitian ini merupakan Pembentukan kelompok swadaya masyarakat merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam mengelola Perumahan dan Permukiman layak huni dan berkelanjutan yang dilakukan pada tingkat komunitas sampai

pada tingkat kota sebagai fasilitator pengelolaan Perumahan dan Permukiman layak huni.

Tabel 4. Variabel dan Indikator

NO	VARIABEL	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	
1	IMPLEMENTASI (X 1)	KOMUNIKASI KEBIJAKAN	a. sosialisasi kebijakan b. manfaat kebijakan c. tranmisi kebijakan	
		(X 2)	SUMBER DAYA PEMBANGUNAN	a. dukungan aparatur b. dukungan anggaran c. dukungan sarana prasarana
		(X 3)	DISPOSISI / PRILAKU	a. disiplin aparatur b. respon positif c. respon negatif
		(X 4)	STRUKTUR BIROKRASI KEBIJAKAN	a. Standar Operasional Prosedur b. fragmentasi c. kewenangan
2	KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SEHAT			
		(Y 1)	FISIK	a. bangunan gedung b. drainase c. jalan lingkungan
	(Y 2)	NON FISIK	a. Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat b. penyediaan dan sosialisasi norma, standar dan kriteria c. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan dan konsultasi	

Sumber: Data diolah penulis tahun 2016

D. Lokasi Penelitian

Penetapan penelitian ditentukan secara *purposive* atau berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan tujuan penelitian. *Purposive* adalah lokasi penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan diambil berdasarkan tujuan penelitian Effendi (2000:169). Penelitian ini dilakukan berdasarkan lokasi yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengetahui Pengaruh implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat No 02/PRT/M/2016 Terhadap kualitas peningkatan lingkungan permukiman berbasis komunitas. Penulis akan menetapkan tempat penelitian di Sukamenanti Baru Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, alasan penulis memilih Kelurahan Sukamenanti Baru Kecamatan Kedaton Bandar Lampung karena :

1. Berdasarkan pada Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung No 974/IV.32/HK/2014 Menetapkan bahwa salah satu daerah yang menjadi lokasi ditetapkannya perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Bandar Lampung yaitu Kelurahan Sukamenanti Baru yang dimana pada Kelurahan tersebut bukan termasuk kawasan sekitar pinggir rel atau kawasan pinggiran laut, yang dimana kawasan pinggir rel dan pinggir laut memiliki intensitas lebih besar menjadi kawasan atau permukiman yang kumuh, hal itu seperti yang diungkapkan oleh Prof. Dr. Parsudi Suparlan yang mengatakan bahwa permukiman yang berada pada kawasan SUTET, semapadan sungai,

sempadan rel kereta api, dan sempadan situ/danau merupakan kawasan permukiman kumuh, sehingga alasan peneliti melakukan penelitian di Kelurahan Sukamenati Baru adalah ketika peneliti melakukan pra riset dalam penelitian ini peneliti melihat secara langsung kondisi pemukiman kumuh yang terdapat di kelurahan Sukamenati baru tersebut bukan termasuk ke wilayah atau lingkungan yang sering di kategorikan lingkungan kumuh seperti pinggiran rel kereta dan di pinggiran pantai.

2. Kelurahan Sukamenati Baru memiliki 2 Lingkungan yang terdiri dari Lingkungan 1 dan Lingkungan 2 dengan total jumlah penduduk 4571 Jiwa, dan yang menjadi lokasi penelitian adalah penduduk di Lingkungan 1, dengan jumlah penduduk 2618 Jiwa yang terbagi menjadi 6 RT. Kemudian dari pembagian 6 RT yang ada di Lingkungan 1, hanya 2 RT saja yang dijadikan fokus lokasi, karena hanya 2 RT yang menjadi lokasi berjalannya kegiatan peningkatan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang sudah berjalan dari tahun 2015, RT yang dimaksud ada RT 4 dan RT 5.

E. Jenis Data

Penelitian ini perlu didukung dengan adanya data yang akurat dan lengkap. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber dari penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya Bungin (2001 : 73). Sumber Data Primer dalam penelitian ini

diperoleh dari kuesioner yang disebarakan kepada masyarakat Kelurahan Sukamenanti Baru Kecamatan Kedaton Bandar Lampung.

Data primer diperlukan sebagai data untuk memperoleh hasil yang akurat sehingga data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan penelitian, baik dari hasil kuesioner maupun jika perlu dilakukan wawancara kepada responden. Berdasarkan penjelasan diatas, maka data primer dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian secara langsung.

Peneliti menyimpulkan data primer adalah data yang berasal dari sumber pertama yang dikumpulkan langsung dari lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada informan di Kelurahan Sukamenanti Baru Lingkungan 1 dan lebih tepatnya informan yang berada di RT 04 dan RT 05 yang mendapatkan bantuan kegiatan PLPBK (Peningkatan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas) pada tahun 2015.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau sumber data yang dicatat oleh pihak lain Bungin (2001:75). Data sekunder dalam penelitian ini yaitu dapat berupa data-data yang berasal dari artikel-artikel dan karya ilmiah yang dipublikasikan di internet serta berbagai literatur yang mendukung permasalahan seperti buku, majalah, artikel dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti menyimpulkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian terdahulu yang dilakukan oleh pihak lain yang terkait dengan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sehingga dapat diperoleh dengan mudah dan cepat. Data sekunder lainnya dalam penelitian ini adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yang terkait dengan penelitian ini, seperti jurnal yang berkaitan dengan kawasan kumuh atau perumahan kumuh, kemudian monografi dari Kelurahan Sukamenanti Baru serta didukung juga dari buku-buku terkait dari masalah kawasan kumuh dan upaya-upaya perbaikan dari masalah yang timbul dari dampak negatif kawasan kumuh (*slum area*), Surat Keputusan Walikota No.974/IV.32/HK/2014, Peraturan Menteri PUPR No. 02/PRT/M/2016, Jumlah Penduduk (Kartu Keluarga), Foto-foto dokumentasi penelitian.

F. Populasi dan Sample

1. Populasi

Populasi dalam buku karangan Bungin (2005:99) adalah berasal dari kata bahasa Inggris *population*, yang berarti jumlah penduduk. Menurut Setiady (2008:42) populasi adalah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran dari pada karakteristik tertentu mengenai sekelompok obyek yang lengkap dan jelas. Populasi dapat dikatakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulan Sugiyono (2013: 16). Dalam konteks penelitian ini populasi yang dimaksud adalah penduduk yang berada di wilayah kumuh Kota Bandar Lampung, dan sesuai dengan lokasi penelitian populasi yang dimaksud yaitu seluruh penduduk yang berada di Kelurahan Sukamenanti Baru di Lingkungan I lebih tepatnya jumlah kartu keluarga.

Menurut Arikunto (2002 : 108) populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Sukamenanti baru LK 1 yang berjumlah 2.618 Jiwa, dan memiliki 165 Kartu Keluarga.

2. Sample

Menurut Sugiyono (2013 : 59) menyatakan *sampel* adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah kepala keluarga yang berada di Kelurahan Sukamenanti Baru Lingkungan I yang berjumlah 165 kepala keluarga. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Populasi Sampling*. Teknik pengambilan sampel secara *Populasi Sampling* digunakan karena tidak seluruh lapisan masyarakat bisa dijadikan sampel.

Berikut adalah teknik pengambilan populasi masyarakat (Kelurahan Sukamenanti Baru menggunakan teknik *Sample Populasi* :

$$n = \frac{N}{Ne^2 + 1}$$

Keterangan :

n = Banyaknya unit sampel

N = Banyaknya populasi

e = Taraf nyata (0,05)

Berdasarkan rumus sample tersebut, maka dalam penelitian ini menggunakan sample fisik yang ada di sukamenanti baru, yaitu :

Lingkungan I = terdiri dari 6 RT, dan 2618 jiwa penduduk dengan jumlah 165 Kepala Keluarga

Lingkungan II = terdiri dari 4 RT, dan 1953 jiwa penduduk dengan jumlah 115 Kepala Keluarga

Sehingga pada penelitian ini populasi yang digunakan adalah populasi yang berdasarkan jumlah kepala keluarga yaitu 165 Kepala Keluarga di Lingkungan I, karena masyarakat Sukamenanti Baru di Lingkungan I yang merasakan dampak dari adanya kegiatan proyek peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dan untuk mengetahui perhitungan sampel dapat dilihat sebagai berikut:

$N = 165$

Populasi 165 merupakan jumlah kepala keluarga di Kelurahan Sukamenanti Baru LK I .

e = Ditetapkan 0,05 yaitu penyimpangan dalam pemakaian sampel sebesar 5%.

1 = Bilangan Konstanta

Demikian dapat diketahui besarnya sampel sebagai berikut :

$$n = \frac{165}{(165) \cdot (0,05)^2 + 1}$$

$$n = \frac{165}{165 (0,0025) + 1}$$

$$n = \frac{165}{1,4125}$$

$n = 116,81415$ dibulatkan menjadi 117

Berdasarkan hasil perhitungan sampel, maka dapat diketahui bahwa banyaknya responden yang akan diteliti dari populasi kepala keluarga di Kelurahan Sukamenanti Baru sebanyak 117 sampel (orang). Setelah mendapatkan sampel yang dibutuhkan, menurut Rahmat (1997:82) langkah selanjutnya adalah menentukan sampel perkelompok atau perlingkungan dari sampel yang telah di dapat, yaitu dengan menggunakan rumus penentuan sampel agar sampel lebih proporsional.

Rumus yang digunakan :

$$N = \frac{a}{b} \times 117$$

Keterangan :

N = Jumlah Sample

a = Jumlah sample populasi

b = Jumlah Populasi

Berdasarkan rumus pengambilan sampel kelompok di atas maka sampel frase dalam penelitian ini adalah :

Jumlah sampel Kelurahan Sukamenanti Baru per RT :

a. RT 4

$$N = \frac{78 \text{ jumlah Kartu Keluarga di RT 4} \times 117}{165}$$

$$N = 55$$

b. RT 5

$$N = \frac{87 \text{ jumlah Kartu Keluarga di RT 5} \times 117}{165}$$

$$N = 62$$

Jumlah sampel Kelurahan Sukamenanti Baru pada penelitian ini adalah 117 orang yang tersebar di 2 RT di lingkungan I Kelurahan Sukamenanti Baru Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung. Jadi jumlah sampel frase dari RT 4 adalah 55 sampel, dan RT 5 ada 62 sample.

G. Penentuan Responden

Pada penelitian ini Responden yang dijadikan sebagai sumber informasi dalam kuesioner adalah masyarakat Kelurahan Sukamenanti Baru Kecamatan Kedaton Lingkungan I RT 4 dan RT 5 dengan sengaja dan tujuan tertentu. Menurut Faisal (1990 : 78) agar memperoleh informasi yang lebih terbukti, terdapat beberapa kriteria yang dipertimbangkan yaitu :

- 1) Subjek sebagai Kepala Keluarga
- 2) Subjek yang berada atau tinggal di Kelurahan Sukamenanti Baru Lingkungan I RT 4 dan RT 5
- 3) Subjek yang mempunyai cukup banyak informasi dan waktu untuk dimintai keterangan

Untuk itu yang menjadi Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Sukamenanti Baru Lingkungan I RT 4 dan RT 5.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kuesioner

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan disusun oleh

peneliti yang kemudian diberikan kepada seluruh responden mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian. Data yang dicari dalam kuesioner merupakan data interval atau data rasio, yang dimana data yang dicari merupakan data yang mempunyai ruas atau interval atau jarak yang berdekatan dan sama.

Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang terdiri dari item-item pertanyaan secara terstruktur yang berkaitan dengan penelitian. Kuesioner yang dipergunakan adalah kuesioner tertutup yaitu daftar pertanyaan yang disertai alternatif jawaban. Kuesioner diambil untuk mengetahui Pengaruh Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat No 02/PRT/M/2016 Terhadap kualitas peningkatan lingkungan permukiman berbasis komunitas di Kelurahan Sukamenanti Baru Kecamatan Kedaton Bandar Lampung. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 54 item pernyataan yang diberikan kepada 117 responden yang ada di RT 04 dan RT 05 di Lingkungan I Sukamenanti Baru.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan dokumentasi dalam penelitian ini berupa catatan, buku monografi kelurahan, data penduduk, literatur, jurnal atau skripsi, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, agenda dan sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk

memperoleh data sekunder dan merupakan teknik bantu dalam pengumpulan data.

I. Teknik Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan data dari lapangan, maka tahap selanjutnya adalah mengadakan pengolahan data dengan menggunakan program *Statistical Package for Social Science (SPSS) 21*. Menurut Siregar (2013 : 86) pengolahan data dengan pendekatan kuantitatif adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu. Pengolahan data meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. *Editting* adalah proses pengecekan atau memeriksa data yang telah berhasil dikumpulkan dari lapangan, karena kemungkinan data yang telah masuk tidak memenuhi syarat atau tidak dibutuhkan
2. Koding adalah kegiatan pemberian kode tertentu pada tiap-tiap data yang termasuk kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka-angka atau huruf untuk membedakan antara data atau identitas data yang akan dianalisis. Pemberian kode melalui program *Microsoft excel* sebelum memasukkannya ke dalam program *SPSS 21* yang berguna untuk memudahkan peneliti menginput data kedalam *SPSS 21*. Dalam penelitian ini proses pemberian kode dilakukan pada saat penentuan hasil jawaban responden di kuesioner penelitian.

3. *Format Entry Data* di Program *SPSS 21* merupakan suatu proses pembuatan format pengerjaan data pada program *SPSS* sebelum nantinya data dimasukkan ke dalam komputer. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini yaitu untuk mengukur uji validitas dan reliabilitas, uji hipotesis, dan data hasil kuesioner penelitian.
4. Pemindahan data adalah memasukkan data yang telah didapat (berupa kode) ke dalam mesin pengolah data yaitu *SPSS 21*, sehingga nantinya didapatkan hasil dari pengolahan tersebut dalam bentuk tabel.
5. Tabulasi adalah proses penempatan data ke dalam bentuk tabel yang telah diberi kode sesuai dengan kebutuhan analisis. Tabel-tabel yang dibuat sebaiknya mampu meringkas agar memudahkan dalam proses analisis data.
6. Penyajian Data adalah suatu bentuk penyajian data ke dalam bentuk tabel, baik itu dalam tabel distribusi frekuensi maupun tabel silang yang nantinya dapat digunakan untuk penyajian data di dalam isi penelitian.

J. Teknik Penentuan Skor

Setelah seluruh data yang diperoleh dalam penelitian diuraikan, maka pada tahap selanjutnya akan dilakukan pembahasan data yang telah diuraikan tadi. Interpretasi data secara keseluruhan untuk masing-masing variabel dapat dilakukan setelah terlebih dahulu diklasifikasikan berdasarkan nilai-nilai yang diperoleh dari responden. Berdasarkan klasifikasi yang telah ditentukan. Adapun Penskoran yang

digunakan untuk mengklasifikasikan data tersebut adalah menggunakan skala *likert* yang terdiri dari : sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju.

Keempat penilaian tersebut diberi bobot sebagai berikut :

- a. Untuk alternatif jawaban sangat setuju diberi bobot 4
- b. Untuk alternatif jawaban setuju diberi bobot 3
- c. Untuk alternatif jawaban tidak setuju diberi bobot 2
- d. Untuk alternatif jawaban sangat tidak setuju diberi bobot 1

Skala *likert* kemudian menskala individu yang bersangkutan dengan menambahkan bobot dari jawaban yang dipilih. Nilai rata-rata dari masing-masing responden dapat dikelompokkan dalam kelas interval, dengan jumlah kelas 4 intervalnya dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Interval} = \frac{\text{Nilai tertinggi} - \text{Nilai terendah}}{\text{Jumlah Kelas}}$$

Maka diperoleh :

$$\text{Interval} = \frac{4 - 1}{4}$$

$$\text{Interval} = 0,8 \text{ (nol koma delapan)}$$

Dengan demikian dari skala distribusi terhadap jawaban responden adalah :

- a. 1,00 – 1,80 = sangat tidak setuju
- b. 1,81 - 2,60 = tidak setuju
- c. 2,61 - 3,40 = setuju
- d. 3,41 - 4,20 = sangat setuju

Untuk menentukan tergolong sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju maka jumlah jawaban responden pada penelitian ini akan ditentukan rata-ratanya dengan membagi jumlah pertanyaan yang ada di kuisioner dan hasil dari pembagian jumlah jawaban responden tersebut, akan dapat diketahui jawaban responden termasuk kedalam beberapa kategori.

Adapun kategori jawaban responden pada masing masing variabel dapat dilihat sebagai berikut :

- a) Untuk kategori skor sangat tinggi = 3,28-4,03
- b) Untuk kategori skor tinggi = 2,52-3,27
- c) Untuk kategori skor rendah = 1,76-2,51
- d) Untuk kategori skor sangat rendah = 1,00-1,75

K. Uji Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Menurut Arikunto (2002 : 144) validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu *instrument*. Suatu *instrument* yang valid atau sah mempunyai validitas yang tinggi, sebaliknya *instrument* yang kurang valid berarti memiliki validitas yang rendah.

Pengujian validitas ditujukan untuk melihat hubungan antar masing-masing item pertanyaan pada variabel bebas dan variabel terikat dengan pengujian sebanyak 117 kuesioner. Apabila ada satu pertanyaan yang dinyatakan tidak valid, sebaiknya direvisi atau dihilangkan dari daftar pertanyaan sehingga terlihat konsistensi dari masing-masing item pertanyaan dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Metode uji validitas yang digunakan pada penelitian ini adalah metode korelasi *product moment* dengan syarat sebagai berikut :

1. Sampel diambil dengan teknik *random* (acak)
2. Data yang akan diuji harus *homogen*
3. Data yang akan diuji juga harus berdistribusi normal
4. Data yang akan diuji bersifat linier

Kemudian dengan rumus product moment sebagai berikut:

$$r = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[n \sum x^2 - (\sum x)^2][n \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

Keterangan :

r = Nilai Validitas

x = Jumlah skor item pertanyaan

y = Jumlah skor total pertanyaan

n = Jumlah sampel yang akan diuji Arikunto (2002 : 144)

Kriteria putusan:

Validitas hitung $> r$ tabel maka valid atau sah

Validitas hitung $< r$ tabel maka tidak valid tidak sah

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur sejauh mana alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Uji reliabilitas menggunakan rumus korelasi *Alpha Cronbach*. (Uyanto.2006:264) digunakan rumus sebagai berikut:

$$\alpha_{Cronbach} = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^k S_i^2}{S_p^2} \right)$$

Keterangan:

K = Jumlah butir dalam skala pengukuran

S_i^2 = Ragam (*variance*) dari butir ke- i

S_p^2 = Ragam (*variance*) dari skor total. (Uyatno, 2006:264)

Uyanto (2006:265) suatu instrument dikatakan reliabel apabila nilai alpha cronbach > 0,6 untuk perhitungan *instrument* penelitian validitas dan reliabilitas digunakan alat bantu program statistika SPSS 21.

L. Teknik Analisis Data

1. Uji Korelasi

Uji korelasi yakni untuk mengetahui nilai penghubung atau korelasi antara dua variabel yang diteliti. Nilai koefisien atau indeks korelasi digunakan sebagai pedoman untuk menentukan ada tidaknya korelasi, bagaimana arah hubungan dan besaran hubungan yang terjadi antar dua variabel. Peneliti menggunakan metode analisis statistik Korelasi *Product Moment*. Analisis Korelasi *Product Moment* digunakan untuk mengetahui kuat tidaknya hubungan, serta arah hubungan antara variabel dari implementasi kebijakan dan variabel peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh .

$$r_{xy} = \frac{N \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[N \sum x^2 - (\sum x)^2][N \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

Keterangan :

r_{xy} = Nilai koefisien korelasi *product moment*

x = Jumlah skor pertanyaan sub variabel implementasi kebijakan

y = Jumlah skor pertanyaan sub variabel indeks perumahan dan permukiman yang sehat

N = Jumlah sampel yang diuji Sugiyono (2013 : 213)

Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap nilai koefisien yang diperoleh, maka digunakan pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut :

Tabel 5. Nilai Koefisien Korelasi

Koefisien Korelasi	Tingkat Hubungan
0.00 – 0.199	Sangat rendah
0.20 – 0.399	Rendah
0.40 – 0.599	Sedang
0.60 – 0.799	Kuat
0.80 – 1.000	Sangat kuat

Sumber : Sugiyono, 2013:183

Pengujian yang dilakukan untuk mengetahui persentase besarnya sub variabel implementasi kebijakan (X) mempengaruhi sub variabel peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh (Y) digunakan koefisien determinasi, dengan rumus:

$$\mathbf{KD} = (r_{xy})^2 \times 100\%$$

Keterangan:

KD = Koefisien Determinasi

r_{xy} = Koefisien Korelasi *Product Moment* (Sugiyono, 2013:213)

Berdasarkan penjelasan rumus koefisien determinasi, Koefisien diterminasi dengan simbol r^2 merupakan proporsi variabilitas dalam suatu data yang dihitung didasarkan pada model statistik, sehingga secara umum r^2 digunakan sebagai informasi mengenai kecocokan suatu model. Dalam regresi r^2 ini dijadikan sebagai pengukuran seberapa baik garis regresi mendekati nilai data asli. Kemudian adapun hasil desimal yang didapat dari r^2 yaitu hasil dari hubungan antara variabel X (independen) terhadap variabel Y (dependen) dapat dilihat dengan bentuk persen (100%) untuk mempermudah melihat seberapa besar korelasi antara variabel tersebut.

2. Uji Regresi

Regresi digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel X dengan variabel Y. Adapun rumus regresi linier sederhana Sugiyono (2013 : 188) adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bx$$

Keterangan :

Y = Nilai variabel bebas yang diramalkan

a = Konstanta bila harga $X = 0$

b = Koefisien regresi

x = Nilai variabel independen

Berdasarkan rumus regresi sederhana tersebut menunjukkan bahwa rumus tersebut digunakan untuk melihat ada hubungan secara linear antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Kemudian analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Sehingga akan ada tingkat pengaruhnya jika ada penambahan atau penurunan a (konstanta) yang akan berpengaruh pada penurunan dan penambahan dari setiap nilai koefisien regresinya.

M. Uji Hipotesis

Uji statistik koefisien korelasi *product moment* (r) digunakan untuk menguji signifikan atau tidaknya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji T-test yaitu dengan membandingkan antara t hitung dengan t tabel. Sugiyono (2013:234) menyatakan bahwa, “Uji t dapat digunakan bila sampel lebih dari 30 dimana dalam tabel tidak ada”. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini karena jumlah *sampel* lebih dari 30 orang ($n > 30$), maka menggunakan uji T-test. Rumus uji T-test yaitu:

$$T_{hit} = r \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}$$

Keterangan :

r = Koefisien korelasi

n = Banyaknya pasangan rank (*sampel*) (Sugiyono, 2013:234)

Dengan pertimbangan sebagai berikut :

Untuk H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan positif antara X dan Y

H_a : Terdapat pengaruh yang signifikan positif antara X dan Y

H_0 diterima (H_a ditolak) apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$

H_0 ditolak (H_a diterima) apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$

IV. GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Singkat

Kelurahan Sukamenanti terletak 7 Km dari Ibu Kota Provinsi Lampung dan hanya 2 Km dari pusat-pusat Pemerintahan Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung. Kelurahan Sukamenanti Pada Tahun 2012 oleh Walikota Bandar Lampung Di Pecah Menjadi Dua Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Sukamenanti
2. Kelurahan Sukamenanti Baru

Adapun Walikota memecah menjadi dua Kelurahan karena luas wilayah Sukamenanti terlalu luas dan penduduknya padat, sehingga Walikota Bandar Lampung yaitu Bapak Herman HN MM memiliki tujuan agar tiap-tiap kelurahan dapat melakukan pembangunan yang merata, baik bantuan dari Pemerintah Kota atau Pemerintah Provinsi sehingga pelayanan masyarakat dapat teratasi dengan cepat oleh Pemerintah Kelurahan masing-masing.

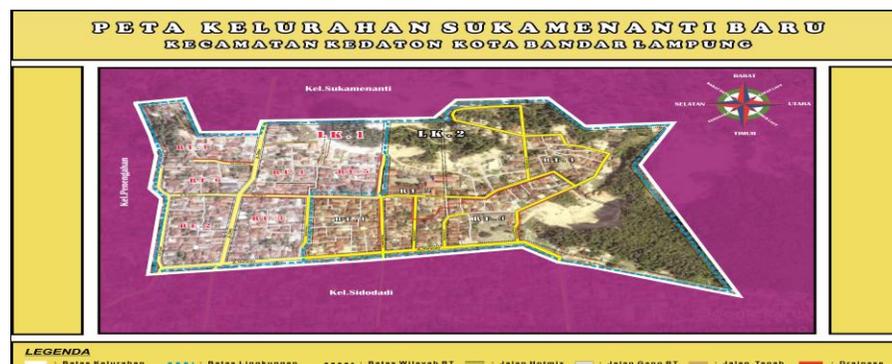
Kelurahan Sukamenanti Baru merupakan pemekaran dari kelurahan Sukamenanti. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang otonomi daerah yaitu

penataan pembentukan kelurahan dan kecamatan Nomor 04 Tahun 2012 tanggal 18 Juni 2012. Kemudian Kelurahan Sukamenanti Baru Kecamatan Kedaton oleh Bapak Walikota Bandar Lampung Drs. H. Herman.HN. MM di beri Predikat Kelurahan Terkumuh No.5 dari Seluruh Kelurahan Di Kota Bandar Lampung.

Kelurahan Sukamenanti Baru merupakan daerah perbukitan yang terbagi atas 2 lokasi permukiman penduduk dataran tinggi dan dataran rendah yang berada disekitar lokasi galian bukit merupakan daerah kumuh yang dihuni sebagian besar masyarakat ekonomi lemah serta kurangnya pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana jalan. Secara Geografi Kelurahan ini termasuk Kelurahan yang berdataran tinggi dengan suhu udara rata-rata $27 - 33^{\circ}\text{C}$. Adapun batas Kelurahan Sukamenanti Baru adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Sidodadi
- b. Sebelah Timur : Kelurahan Sidodadi
- c. Sebelah Selatan : Kelurahan Penengahan
- d. Sebelah Barat : Kelurahan Sukamenanti

Gambar 2. Peta Kelurahan Sukamenanti Baru Kecamatan Kedaton B.Lampung



Sumber: Data Kelurahan Sukamenanti Baru Tahun 2016

Kelurahan Sukamenanti Baru terbentuk menjadi 2 Lingkungan yaitu Lingkungan I yang terdiri dari 6 RT dan Lingkungan II yang terdiri dari 4 RT. Kemudian daerah yang ada di Lingkungan I dan Lingkungan II adalah daerah perbukitan yang mata pencarian dari sebagian penduduknya adalah penambang batu gunung dan buruh bangunan. Jumlah Penduduk di Sukamenanti Baru Lingkungan I terdiri dari 2.618 jiwa, dan yang berada di Lingkungan II terdiri dari 1953 jiwa yang jika ditotalkan terdapat 4.517 penduduk yang ada di Sukamenanti Baru. Pada Tahun 2010 - 2014 masyarakat Sukamenanti Baru banyak kekurangan air bersih, rawan Longsor, rawan banjir dikarenakan jarang sumur bor umum, jalan banyak berlubang, drainase dan talud banyak yang rusak dan ada juga titik yang belum tersentuh oleh pembangunan dari bantuan Pemerintah. Di Kelurahan Sukamenanti Baru Titik Kumuh merata di tiap RT, hampir Seluruh RT banyak infrastruktur yang Rusak dan Kekurangan Air bersih.

Gambar 3. Kondisi lingkungan Sukamenanti Tahun 2013



Sumber: Dokumentasi Kelurahan Sukamenanti Baru Tahun 2013

Berdasarkan gambar 3, dapat dilihat bahwa keadaan lingkungan perumahan dan permukiman di Sukamenanti Baru terdapat beberapa titik masalah, contohnya pada sektor kondisi jalan lingkungan disekitar perumahan padat penduduk, yang tidak diimbangi dengan adanya sistem drainase yang baik, kemudian kesesuaian bentuk bangunan tempat tinggal yang layak huni serta kondisi jalan lingkungan yang mendukung sebagai akses utama masyarakat untuk berinteraksi kepada sesama penduduk lainnya. Kemudian masalah-masalah yang terjadi di Lingkungan I khususnya RT 4 dapat diidentifikasi berdasarkan beberapa sisi, yaitu:

A. Kesesuaian Lahan

Kelurahan Sukamenanti Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung memiliki luas 74,64 Ha, saat ini telah terbagi 2 kelurahan yaitu Kelurahan Sukamenanti dan Sukamenanti Baru. Berdasarkan kemiringan lereng daerah Sukamenanti memiliki kemiringan lereng 2% – 20%. Berdasarkan analisa kawasan prioritas yang berada pada lahan dengan kemiringan > 8%, hal ini menyebabkan kan permukiman sukamenanti rawan terhadap longsor khususnya di kawasan prioritas maka diperlukan pengamanan lahan berupa talud penahan tanah dan perbaikan akses ke permukiman yang dapat mengamankan masyarakat dari bahaya longsor.

B. Penggunaan Lahan

Jika dilihat dari data eksisting sarana ruang terbuka hijau (RTH) yang terdapat dikelurahan Sukamenanti tidak memiliki RTH (ruang terbuka hijau) hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan lahan yang ada di kelurahan Sukamenanti terdiri dari:

Tabel 6. Penggunaan Lahan Kelurahan Sukamenanti

No	PenggunaanLahan	Luas(ha)	Luas(m2)	LuasIdeal(m2)
1	Lahan permukiman	73,639	736.390	665.200
2	Lahan kuburan	0,500	5000	1385,8
3	Lahan Prasarana Umum	0,500	5000	
4	Lahan Perkantoran	0,01	100	
5	Lahan Pekarangan	-	-	
6	RTH	-	-	58.203,6
7	Lain-lain	-	-	
	Total	74,640	746.400	

Sumber: Monografi Kelurahan Sukamenanti tahun 2014

C. Tipologi rumah dan Lingkungan kawasan prioritas

Kondisi umum kawasan prioritas merupakan kawasan pemukiman kumuh dan miskin. Dengan kondisi ekisting rumah yang beragam, dimana untuk rumah yang berada di lokasi rendah sebagian besar sudah menggunakan bangunan permanen, sedangkan untuk kondisi rumah yang berada dekat dengan bukit rata-rata masih menggunakan geribik bambu dan menggunakan talud tidak permanen untuk mencegah longsor.

Gambar 4. Tipologi permukiman di kawasan Prioritas



Sumber: Data Dokumentasi Kelurahan Sukamenanti Baru Tahun 2014

Berdasarkan gambar 4, dapat dilihat rumah yang berada didataran dekat perbukitan sukamenanti, masyarakat yang tinggal didaerah perbukitan mayoritas

memiliki rumah yang belum permanen, karena mayoritas masyarakat berfikir bahwa kawasan tempat rumah mereka berdiri sangat rawan sekali dengan bencana alam yang bisa kapan saja datang, kemudian didukung dengan bentuk tanah yang tidak rata untuk kondisi rumah di kawasan prioritas yang berada di dekat bukit Sukamenanti, diperlukan adanya desain teknik sehingga pemukiman aman dari bahaya longsor dan banjir.

Gambar 5. Jalan lingkungan di Sukamenanti Baru



Sumber: Data Dokumentasi Kelurahan Sukamenanti Baru Tahun 2014

Berdasarkan pada gambar 5, menunjukkan bahwa kondisi lingkungan pada kawasan prioritas menggunakan paving blok sehingga masih terdapat daerah resapan, namun daerah resapan tersebut masih kurang, maka perlu menambah daerah resapan dan reboisasi kembali terhadap bukit Sukamenanti. Pembangunan jalan lingkungan pada kawasan prioritas sebagai upaya untuk terpenuhinya prasarana bagi pejalan kaki dan pengendara motor, sehingga berfungsi sebagai jalan penghubung dan membuka akses dari atau menuju kawasan agar terlihat baik dan berkualitas.

Gambar 6. Contoh Kondisi rumah yang di RT 04 Lingkungan I



Sumber: Dokumentasi Kelurahan Sukamenanti Baru Kecamatan Kedaton Bandar Lampung

Kemudian dalam RTPLP (*Review* Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman) disebutkan kebutuhan akan perbaikan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) di RT 4 Lingkungan 1 terdapat 30 rumah yang tidak layak huni tentunya ini akan mempengaruhi lingkungan terkait dengan kelayakan kesehatan lingkungan. Jika dilihat hasil *survey baseline* yang dilakukan PNPM mandiri Perkotaan tahun 2015 untuk Kawasan prioritas di RT 4 Lingkungan 1 mempunyai luas permukiman 1,60 Ha dengan jumlah bangunan yang ada 57 bangunan dengan kepadatan 35,67 Unit/Ha, keteraturan bangunan hunian 46% yang menghadap jalan atau mempunyai jalan artinya 54% tidak mempunyai akses jalan, jika dilihat dari kelayakan bangunan hunian jumlah bangunan yang memiliki luas lantai > 7,2 m² Perorang sejumlah 50 Unit Rumah tangga.

D. Jaringan Jalan

Pada daerah prioritas sarana jalan atau akses masih banyak kekurangan. Pada kawasan prioritas terdapat suatu daerah yang belum memiliki jalan, dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 7. Kondisi jalan prioritas di RT 04



Sumber: Dokumentasi Kelurahan Sukamenanti Baru Kecamatan Kedaton Bandar Lampung

Pada Kelurahan Sukamenanti di RT 04 Lingkungan I panjang jaringan jalan yang ada 1.560 meter, panjang rata-rata jalan lingkungan yang mempunyai lebar >1,50 meter sepanjang 910 meter yang rata-rata sudah diperkeras atau rabat, dari hasil survey jalan yang layak hanya 58% dari total dan rata-rata tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dengan tidak adanya saluran di samping jalan tersebut sebagian besar kawasan sudah terlayani jaringan jalan local maupun arteri. Dengan lebar perkerasan minimal 3 m, dengan kondisi jalan rata-rata baik sampai rusak ringan. Disamping itu pada kawasan prioritas belum memiliki penerangan jalan

lingkungan yang cukup, sehingga ada beberapa titik dikawasan prioritas yang tidak memiliki jalan penerangan dimalam hari.

E. Sanitasi

a. Air bersih dan Air Minum

Pada kawasan prioritas terdapat sarana air bersih yang masih minim. Dimana secara detail dapat dilihat sebagai berikut. Seperti yang sudah dirumus, kebutuhan setiap orang 30–50 liter/hari.

Tabel 7. Prasarana Air bersih di kawasan RT 4 Lingkungan I

No	Prasarana Air Bersih	Jumlah
1	Sumur Pompa	1
2	Sumur Gali	5
3	Hidran Umum	1
4	Tangki Bersih	-

Sumber: Data Kelurahan Sukamenanti Baru Kecamatan Kedaton Bandar Lampung

Kebutuhan air bersih RT4 LK1 = $177 \times 30 = 5310$ liter/hari .Namun jika dilihat dari prasarana yang ada, maka kebutuhan air bersih belum terpenuhi. Dengan kondisi seperti diatas, kelurahan Sukamenanti sudah cukup terlayani kebutuhan air bersih dankondisi sarana air bersih semua dalam kondisi baik. Namun untuk beberapa RT sudah terakomodir oleh adanya sumur yang diadakan dari PNPM reguler. Namun di beberapa titik khususnya di kawasn prioritas masih mengalami kekurangan air. Terutama didaerah gunung batu.

Berdasarkan data *baseline* Kawasan Prioritas RT 4 Lingkungan I yang telah dilakukan jumlah masyarakat yang terlayani Perpipaan maupun non perpipaan terlindungi yg layak sejumlah 47 unit rumah tangga dan 10 yang masih belum layak, dan yang terlayani air minum, mandi cuci dan kakus 82% dan yang terpenuhi sesuai dengan standar minimal 60 liter/hari/orang sebanyak 47 unit rumah tangga Berdasarkan hal tersebut diperlukan penyediaan air bersih dan pemipaan yang layak untuk memenuhi standar minimal kebutuhan perorang yang ada di kawasan prioritas.

b. Air Kotor

Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan.

Gambar 8. Kondisi jalan tanpa drainase di kawasan prioritas Sukamenanti Baru



Sumber: Dokumentasi Kelurahan Sukamenanti Baru Kecamatan Kedaton Bandar Lampung

Berdasarkan gambar 8, menunjukkan bahwa keadaan jalan di Sukamenanti Baru masih belum didukung dengan sistem drainase yang baik, hal ini tentu saja akan merugikan masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan sekitar, karena dengan tidak tersedianya saluran pembuangan aliran air yang baik dan tidak berfungsi secara maksimal, tentu saja hal ini akan berdampak pada peluang-peluang bencana yang akan terjadi seperti banjir.

Mengacu pada kondisi sistem drainase *eksisting* yang ada, maka skenario pengembangan sistem drainase Kota Bandar Lampung di RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Bandar Lampung adalah dengan:

1. Mempertahankan sistem dan saluran drainase yang ada dan merevitalisasi saluran drainase eksisting sesuai dengan jenis dan klasifikasi saluran.
2. Membuat penahan sekaligus pengatur aliran hasil limpasan air hujan yang tidak sempat diserap tanah sehingga aliran tidak terpusat pada salah satu saluran drainase yang dapat menyebabkan terjadi limpasan pada daerah sekitarnya. Bentuk penanganan dapat berupa pembangunan embung ataupun polder (*Check dam*) pada daerah hulu
3. Membuat pengedali banjir pada bagian hilir sekaligus berfungsi pengendali banjir akibat banjir pasang

Selain itu drainase jalan sudah tersedia namun hanya pada jalan utama saja, di beberapa jalan tertentu saluran drainase tidak berfungsi dengan baik dan masih ada yang tidak memiliki drainase sehingga menyebabkan di beberapa titik jalan lingkungan mengalami kerusakan akibat tergerus aliran air, untuk

itu diperlukan pembuatan saluran drainase baru dan perbaikan drainase eksisting. Berdasarkan hasil *baseline* panjang drainase yang ada 1200 meter dan yang memiliki kualitas baik sepanjang 900 meter dan kondisi tersebut yang memiliki kondisi jaringan drainase yang minimum memadai sebesar 75%, untuk itu diperlukan dilakukan pembuatan atau perbaikan drainase agar dapat menghindari dari bahaya banjir dan penyakit.

c. Persampahan

Sistem persampahan di Kelurahan Sukamenanti sebagian besar wilayah sudah dilayani oleh Dinas Kebersihan. Sistem persampahan masih mengandalkan sokli dan tong sampah yang diangkut oleh pemerintah untuk dibawa ke TPA. Berdasarkan data *baseline* di kawasan prioritas jumlah sampah *domestic* rumah tangga yang terlayani oleh pengangkutan TPA minimal 2 minggu sekali sebanyak 43 atau 75% unit rumah tangga, untuk itu diperlukan memperbanyak tong atau tempat sampah yang sudah dapat memilah sampah untuk *proses recycling* sampah di rumah yang belum terjangkau.

F. Mitigasi Bencana

a. Banjir

Kelurahan Sukamenanti Baru memiliki Bukit Sukamenanti yang diperuntukan sebagai salah satu ruang terbuka hijau kota Bandar Lampung. Namun pada kenyataan dilapangan dilakukan kegiatan penambangan liar pada bukit batu tersebut.

Gambar 9. Kawasan serapan air di Sukamenanti Baru



Sumber: Dokumentasi Kelurahan Sukamenanti Baru Kecamatan Kedaton
B.Lampung

Berdasarkan gambar 9, menjelaskan bahwa minimnya daerah resapan air yang dibutuhkan setiap lingkungan perumahan dan permukiman penduduk dapat menjadi suatu peluang terjadinya bencana alam yang mungkin tidak terjadi dalam waktu dekat, tetapi dapat terjadi untuk jangka waktu beberapa tahun kemudian. Salah satu contoh dari akibat yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan bukit batu Sukamenanti Baru menyebabkan sering terjadinya banjir saat musim hujan tiba. Bukit Sukamenanti yang seharusnya menjadi kawasan resapan air hujan tidak bisa berfungsi dengan baik dan tidak optimalnya ruang terbuka hijau dikawasan tersebut. Selain itu penanganan banjir dapat dilakukan dengan memperbaiki saluran drainase.

Gambar 10. Drainase alami di kawasan prioritas



Sumber: Dokumentasi Kelurahan Sukamenanti Baru Kecamatan Kedaton Bandar Lampung

Berdasarkan gambar 10, dapat dilihat sistem drainase dikawasan prioritas hampir semua sistem drainasinya tidak permanen. Bahkan pada daerah prioritas drainase hampir tidak ada untuk masing-masing rumah. Karena itu perlu dilakukan perbaikan infra struktur pada sistem drainase kawasan prioritas.

b. Gempa Bumi dan Longsor

Pengamatan lapangan dan penelitian menjelaskan bahwa Kota Bandar Lampung memiliki potensi bahaya alam yang terdiri dari bahaya guncangan gempa bumi, di beberapa tempat menunjukkan kondisi yang rentan terhadap gempa bumi. Kawasan yang relatif aman dengan potensi paling rendah termasuk Kecamatan Kedaton, tepatnya di Kelurahan Sukamenanti Baru. Gempa bumi yang terasa di Sukamenanti terjadi pada tahun 2004.

Gambar 11. Kemiringan Kawasan Permukiman Prioritas



Sumber: Dokumentasi Kelurahan Sukamenanti Baru Kecamatan Kedaton Bandar Lampung

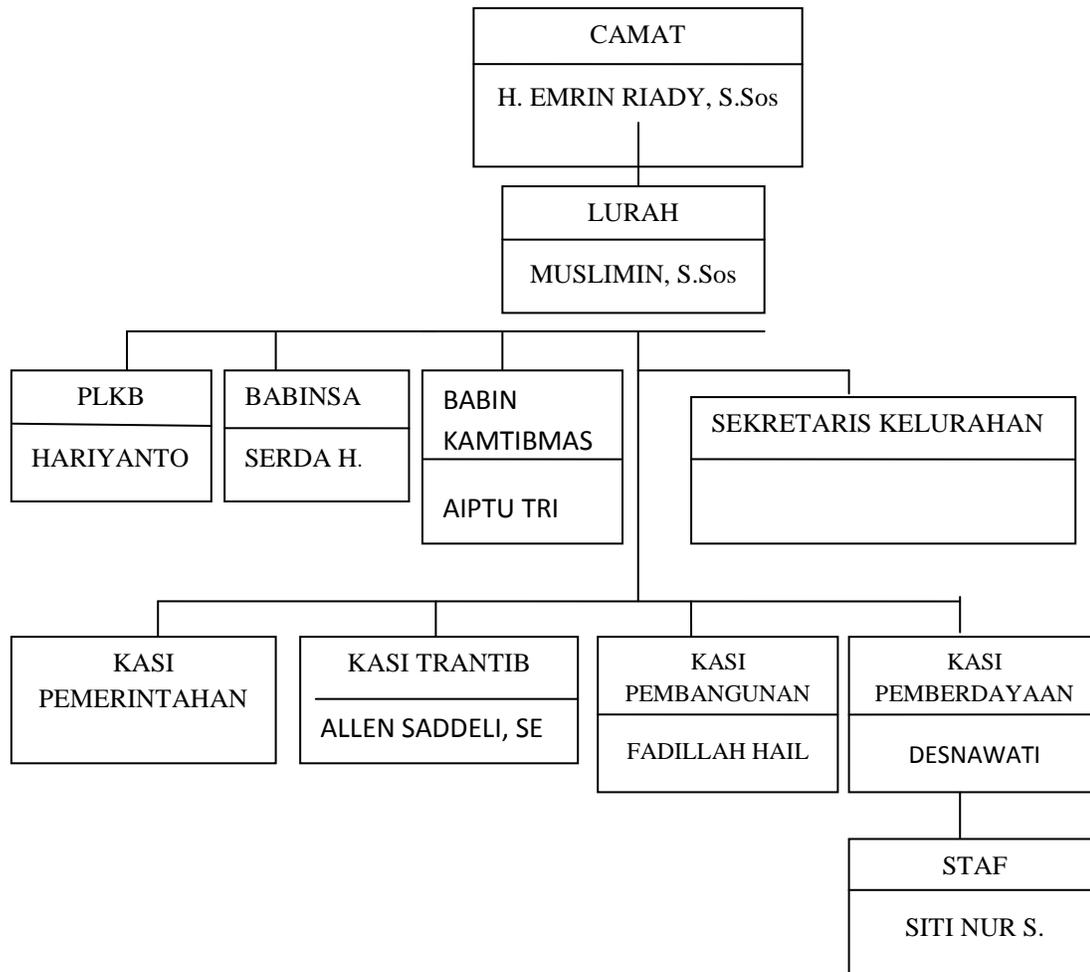
Berdasarkan gambar 11, dapat di analisa bahwa kawasan permukiman Kelurahan Sukamenanti yang berada pada lahan dengan kemiringan $> 8\%$ tidak menggunakan rekayasa teknik. Hal ini yang menyebabkan di beberapa titik kawasan permukiman kelurahan Sukamenanti Baru rawan terhadap bencana longsor. Seperti terlihat pada gambar 11, bahwa berdasarkan kemiringan lereng daerah Sukamenanti Baru memiliki kemiringan lereng $2\% - 20\%$. Berdasarkan RTRW Kota Bandar Lampung tahun 2011-2030 untuk kelurahan Sukamenanti Baru merupakan kawasan lereng dan bukit yang rawan atau berpotensi longsor.

B. Letak Geografis

Kelurahan Sukamenanti Baru secara administrasi berada di jalan Onta Nomor 1 Kecamatan Kedaton Bandar Lampung. Luas wilayah Kelurahan Sukamenanti Baru adalah 31,5 Hektar.

C. Struktur Organisasi Kelurahan

Gambar 12. Struktur Organisasi Kelurahan Sukamenanti Baru Tahun 2016



Sumber: Dokumentasi Kantor Kelurahan Sukamenanti Baru Tahun 2016

D. Tugas dan Fungsi Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung

1. Menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Provinsi di Bidang Pengairan dan Permukiman.
2. Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standa atau pedoman.
3. Penyediaan dukungan/bantuan untuk kerjasama antar kabupaten atau kota dalam pengembangan prasarana dan sarana wilayah pengairan.
4. Penyediaan dukungan pembinaan pengusaha sumber daya air pada wilayah sungai yang lintas kabupaten atau kota.
5. Peningkatan kapasitas teknis dan pelayanan air minum dilingkungan wilayah Provinsi Lampung.
6. Fasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten atau kota dalam pengelolaan sumber daya air.
7. Fasilitasi pengembangan prasarana dan sarana air limbah lintas kabupaten atau kota.
8. Fasilitasi penyelenggaraan dan pembiayaan, pembangunan prasarana dan sarana persampahan secara nasional diwilayah provinsi.
9. Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase skala regional lintas daerah.
10. Fasilitasi penyelesaian pembangunan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun lintas kabupaten/kota.
11. Fasilitasi penyelenggaraan penanganan pemukiman kumuh.

12. Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah Negara yang menjadi aset Pemerintah Provinsi
13. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah provinsi

E. Lembaga Keswadayaan Masyarakat

Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) merupakan salah satu institusi atau lembaga masyarakat yang berbentuk paguyuban, dengan kedudukan sebagai pimpinan kolektif di tingkat Desa atau Kelurahan, yang bertanggung jawab menjamin keterlibatan semua lapisan masyarakat, dalam proses pengambilan keputusan secara partisipatif yang kondusif. LKM sebagai organisasi masyarakat di tingkat Desa atau Kelurahan dengan berhimpun sesama warga setempat yang dipilih oleh masyarakat secara langsung melalui pemilihan umum dan bertumpu pada keputusan tertinggi ada ditangan anggota. Tujuan LKM adalah membangun modal sosial (*capital social*) dengan menumbuhkan kembali nilai-nilai kemanusiaan, ikatan-ikatan sosial dan menggalang solidaritas bersama masyarakat untuk saling bekerjasama demi kebaikan, kepentingan dan kebutuhan bersama yang akan memperkuat keswadayaan masyarakat. Peran Kelompok Masyarakat dalam Penanganan Permukiman Kumuh :

- a) Merancang dan melaksanakan program pembangunan.

Tujuan dari LKM itu sendiri yaitu memandirikan masyarakat, sehingga masyarakat diharapkan mampu merancang dan melaksanakan

pembangunan yang telah disusun. Kegiatan ini disesuaikan dengan kebutuhan penduduk di wilayah studi, apa saja yang perlu diperbaiki dan apa saja yang perlu dibangun guna memenuhi kebutuhan dasar bersama

b) Peningkatan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Untuk meningkatkan kemampuan dasar kelompok masyarakat ini melakukan pelatihan, misalnya pelatihan penggunaan *software* komputer, dan pelatihan yang lainnya. Peningkatan keterampilan ini sesuai dengan peran kelompok masyarakat secara umum.

c) Perbaikan Lingkungan

Perbaikan lingkungan dalam LKM ini sesuai dengan peran kelompok masyarakat secara umum yaitu peran dalam meningkatkan kualitas lingkungan. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan menyusun *action plan* serta melaksanakan kerja bakti.

d) Peningkatan partisipasi

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat perlu dilakukan diskusi yang berkesinambungan.

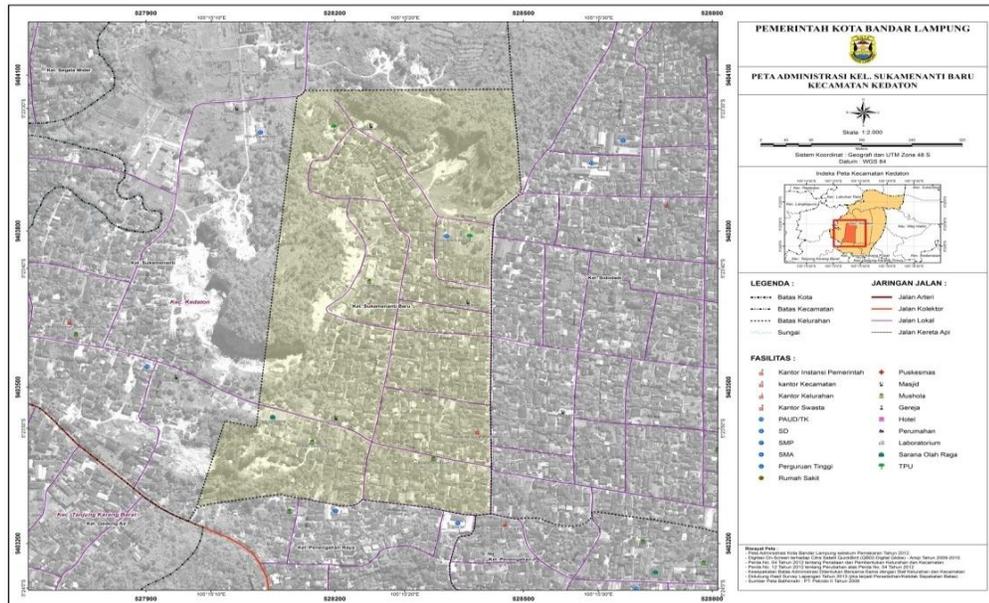
Pembangunan yang bertumpu pada masyarakat atau kelompok masyarakat secara umum dapat dikatakan sebagai metode, proses, pendekatan dan bahkan pranata pembangunan yang meletakkan keputusan-keputusannya berdasarkan keputusan masyarakat. Tujuan dari pendekatan ini yaitu agar hasil

pembangunan dapat diterima oleh masyarakat penghuni kawasan tersebut sesuai dengan kegiatan yang telah mereka laksanakan. Dalam pendekatan ini, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam proses perencanaan dan perancangan program pembangunan. Dua hal dapat ditarik dari pendekatan untuk peningkatan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yang pertama, metode partisipasi merupakan metode penting karena dengan metode inilah keputusan-keputusan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dapat diambil, yang kedua karena pendekatan partisipatif dalam konteks ini adalah bersifat langsung, pengertian masyarakat selalu diartikan kelompok yang langsung memiliki kepentingan dengan proses pembangunan permukiman yang terkait. Karena itu, seringkali pendekatan pembangunan bertumpu pada masyarakat dilakukan untuk pembangunan yang bersifat lokal dan berorientasi pada kepentingan-kepentingan lokal.

Keberhasilan suatu pembangunan yang melibatkan swadaya masyarakat yaitu adanya keberlanjutan finansial untuk pembangunan. Setelah tidak ada bantuan pemerintah masyarakat mampu memelihara hasil pembangunan untuk generasi yang akan datang. Namun, dalam penelitian ini tidak membahas lebih lanjut mengenai keberlanjutan finansial karena lingkup penelitian yaitu terbatas pada peran masyarakat dalam perbaikan secara fisik dan peningkatan partisipasi masyarakat.

F. Peta Administrasi Kelurahan Sukamenanti Baru

Gambar 13. Peta Administrasi



Sumber : Dokumen Kegiatan Peningkatan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Tahun 2016

G. Tugas Pokok Kelurahan Sukamenanti Baru

Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kelurahan.

H. Fungsi Kelurahan Sukamenanti Baru

Kelurahan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana mempunyai fungsi yaitu:

- a. Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan,
- b. Pemberdayaan masyarakat,
- c. Pelayanan Masyarakat,
- d. Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum,
- f. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

I. Batas-batas Kelurahan Sukamenanti Baru

Utara berbatas dengan	: Kelurahan Kedaton
Selatan berbatas dengan	: Kelurahan Penengahan
Timur berbatas dengan	: Kelurahan Sidodadi
Barat berbatas dengan	: Kelurahan Sukamenanti

J. Potensi Kekayaan Alam

Sumber potensi kekayaan alam Kelurahan Sukamenanti Baru adalah berupa tambang batu gunung, yaitu dalam hal ini sangat menunjang perekonomian penduduk Kelurahan Sukamenanti Baru dan masih sangat perlu perhatian pemerintah dalam upaya penciptaan lapangan kerja yang potensial.

Tabel 8: Sumber Air Bersih

Jenis	Jumlah	Pemanfaat	Kondisi
	(unit)	(KK)	Baik / Rusak
Mata air	-	-	-
sumur gali	50	210	Baik
sumur pompa	10	413	baik
hidran umum	-	-	-
PAM	20	20	baik
Pipa	200	20	baik
Sungai	-	-	-
Embung	-	-	-
Bak Penampung air hujan	-	-	-
beli dari tangki swasta	-	-	-
depot isi ulang	-	-	-
sumber lain	-	-	-

Sumber: Buku profil Kelurahan Sukamenanti Baru Tahun 2015

Tabel 9: Kualitas Air Minum

Mata air	Baik
sumur gali	Baik
sumur pompa	Baik
hidran umum	Baik
PAM	Baik
Pipa	Baik
Sungai	-
Bak Penampung air Hujan	-
Beli dari tangki swasta	-
Depot isi ulang	-

Sumber: Buku profil Kelurahan Sukamenanti Baru Tahun 2015

Tabel 10: Mata Pencarian Pokok Masyarakat Sukamenanti Baru

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	1 orang	-
Buruh Tani	-	-
Buruh migran perempuan	-	-
Buruh migran laki-laki	-	-
pegawai negeri sipil	72	56
pengrajin industri rumah tangga	-	1
pedagang keliling	5	5
peternak	1	-
nelayan	2	-
montir	2	-
dokter swasta	-	-
bidan swasta	-	2
perawat swasta	-	-
pembantu rumah tangga	50	-
TNI	11	-
POLRI	11	-
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	52	26
Pengusaha kecil dan menengah	1	-
Pengacara	-	-
Notaris	-	-
Dosen Swasta	1	-
Karyawan Perusahaan Swasta	12	8
Karyawan Perusahaan Pemerintah	96	61

Sumber: Buku Profil Kelurahan Sukamenanti Baru Tahun 2015

Tabel 11: Agama Masyarakat Sukamenanti Baru

Agama	Laki-laki	perempuan
Islam	2172 orang	2274 orang
Kristen	36 orang	30 orang
Katholik	24 orang	28 orang
Hindu	-	-
Budha	4 orang	3 orang
Khonghucu	-	-
Jumlah	2236 orang	2335 orang

Sumber: Buku Profil Kelurahan Sukamenanti Baru Tahun 2015

Tabel 12: Etnis Masyarakat Sukamenanti Baru

Etnis	Laki-laki	Perempuan
1	2	3
Aceh	-	-
Batak	15 orang	10 orang
Nias	-	-
Mentawai	-	-
Melayu	-	-
Minang	-	-
Kubu	-	-
Anak Dalam	-	-
Badui	-	-
Betawi	-	-
Sunda	125 orang	75 orang
Jawa	400 orang	320 orang
Madura	-	-
Bali	-	-
Banjar	-	-
Dayak	-	-
Bugis	-	-
Makasar	-	-
Sasak	-	-
Ambon	-	-

1	2	3
Minahasa	-	-
Flores	-	-
Papua	-	-
Timor	-	-
Sumba	-	-
China	-	-

Sumber: Buku Profil Kelurahan Sukamenanti Baru Tahun 2015

Tabel 13: Data penduduk menurut Pendidikan

Golongan Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
SD	289 orang	264 orang	553 orang
SMP	193 orang	174 orang	367 orang
SMA	300 orang	287 orang	587 orang
DIPLOMA	42 orang	40 orang	82 orang
SARJANA	72 orang	68 orang	140 orang
Tidak Tamat SD	1340 orang	1502 orang	2842 orang
Jumlah	2236 orang	2335 orang	4571 orang

Sumber: Buku Profil Kelurahan Sukamenanti Baru Tahun 2015

Tabel 14: Data Penduduk menurut umur dan jenis kelamin

Golongan Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 - 5 tahun	327	356	683
6 - 15 tahun	326	379	705
16 - 25 tahun	323	332	655
26 - 58 tahun	1070	1067	2137
59 tahun keatas	190	201	391
Jumlah	2236	2335	4571

Sumber: Buku Profil Kelurahan Sukamenanti Baru Tahun 2015

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 02/PRT/M/2016 Terhadap Kualitas Peningkatan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Studi Pada Sukamenanti Baru Kecamatan Kedaton Bandar Lampung) bahwa terdapat pengaruh antara implementasi kebijakan yang terdiri dari 4 variabel, yaitu variabel komunikasi kebijakan, sumber daya pembangunan, perilaku birokrat dan variabel struktur birokrasi kebijakan terhadap kualitas peningkatan lingkungan permukiman berbasis komunitas pada Kelurahan Sukamenanti Baru khususnya masyarakat di Lingkungan I RT 04 dan RT 05 yang memperoleh hasil signifikan dan bernilai positif, maka peneliti dapat menarik simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian di Sukamenanti Baru terkait implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 02/PRT/M/2016 Terhadap Kualitas Peningkatan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas jika dilihat dari faktor selain teori Edward George, bahwa ada faktor lain yang menyebabkan suatu kualitas kebijakan publik bisa

berpengaruh pada kualitasnya, contohnya dari faktor kurangnya kesiapan masyarakat untuk ditinggalkan program dari Pemerintah.

2. Kemudian pada pelaksanaan program Peningkatan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas tersebut, Pemerintah Daerah sebagai pelaksana kurang memperhatikan metode penyampaian komunikasi kebijakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah terkait kebijakan pemerintah yang akan dilaksanakan
3. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang kepedulian terhadap lingkungan tempat mereka tinggal

B. Saran

Beberapa saran yang dapat peneliti ajukan sehubungan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Pemerintah seharusnya memperbaiki pada proses formulasi kebijakan, yang dimana dalam proses perumusan dan penetapan suatu kebijakan harus lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat, dan pemerintah mampu memberikan suatu metode agar masyarakat nantinya bisa mempertanggungjawabkan suatu hasil dari kebijakan pemerintah tersebut tanpa adanya pengawasan dari pihak Pemerintah. Contohnya dengan diadakannya proses pendampingan pasca program selesai dilaksanakan, sehingga masyarakat akan lebih memiliki kesiapan jika ditinggal suatu program yang sudah dilaksanakan oleh pihak Pemerintah

2. Pemerintah sebaiknya dalam menyampaikan suatu pesan dan tujuan dari suatu kebijakan public sebaiknya memiliki suatu perencanaan yang tepat, baik dilihat dari segi waktu, kemudian cara menyampaikan secara langsung, dan melihat sasaran target yang akan dituju
3. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan tempat mereka tinggal harus didukung dengan adanya peran dari Pemerintah, contohnya dengan Pemerintah memperhatikan tingkat ekonomi masyarakat yang berada dalam kondisi kawasan kumuh dengan cara membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang memiliki keterbatasan pendidikan, modal dan kesempatan mendapatkan lapangan pekerjaan, hal ini dikarenakan dalam suatu permukiman kumuh, memiliki hubungan kausal antara kemiskinan dan kawasan kumuh tersebut. Sehingga jika tingkat perekonomian masyarakat sudah diperbaiki, maka secara langsung masyarakat tidak apatis terhadap lingkungannya.
4. Pelaksanaan program Pemerintah di Indonesia khususnya di Provinsi Lampung seperti PLPBK (Peningkatan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas) di harapkan dapat di lakukan menggunakan model *bloked*, yang dimana dalam penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh menuntaskan pada satu titik terdahulu, tanpa melaksanakan penanganan program di titik lainnya. Setelah satu titik kawasan kumuh diselesaikan dengan tuntas, maka suatu program pemerintah baru dapat dilaksanakan lagi di titik selanjutnya yang dikatakan kumuh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul, Wahab, Solichin. 2008. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Impelementasi Kebijakan Negara . Edisi Kedua. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Abidin, Zainal, Said. 2012. *Kebijakan Publik. Salemba Humanika*. Jakarta
- Alam, Syamsu, Andi. 2012. *Studi Kebijakan Pemerintah*. PT. Refika Aditama. Bandung
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Metodologi Penelitian*. Penerbit PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Azwar, Saifudin. 2012. *Reliabilitas dan Validitas*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Airlangga University Press. Surabaya
- Bungin, Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Effendi, Onong Uchana. 2000. *Ilmu Teori & Filsafat Komunikasi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Faisal, Sanapiah. 1990, Penelitian Kualitatif : Dasar dasar dan Aplikasi , Yayasan Asih Asah Asuh Malang (YA3 Malang), edisi I, cet. I

- Firdaus, M. 2013. *Aplikasi Metode Kuantitatif Untuk Manajemen dan Bisnis*. PT. Penerbit IPB Press. Bogor
- Kuswartojo, Tjuk. 2005. *Perumahan dan Pemukiman Indonesia*. ITB. Bandung
- Kuswartojo, Tjuk. 1996. *Perumahan dan Permukiman yang Berawawasan Lingkungan*. ITB. Bandung
- Komarudin. 1997. *Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman*. PT. Rakasindo. Jakarta
- Nugroho, Riant, Dr. 2009. *Public Policy*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta
- Poerwanto, Hari 2000. *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Persepektif Antropologi*. Pustaka Pelajar Offset. Yogyakarta
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta
- Purnomo Setiady Akbar. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Sastra, Suparno. 2006. *Perencanaan dan Pengembangan Perumahan*. C.V Andi Offset. Yogyakarta
- Siagian, Sondang P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara. Jakarta.
- Siregar, Syofian. 2013. *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta. PT. Bumi Aksara
- Soemarwoto, Otto. 1992. *Analisis Dampak Lingkungan*. UGM. Yogyakarta
- Sugiyono, Prof, Dr. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta. Bandung
- Susilo, Dwi, Rachmad. 2008. *Sosiologi Lingkungan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Wahab, Abdul, Solihin. 2014. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. PT. Bumi Aksara. Jakarta
- Winarno, Budi (2012). *Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta : Caps.

B. Dokumen

Arsyad,H.M. 2003. *Implementasi peraturan pemerintah nomor 33 tahun 1998 tentang modal penyertaan pada koperasi wanita “setia bhakti wanita” Surabaya*

Fitria, Niken. 2014. *Identifikasi Karakteristik Lingkungan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat*

Handrianto, Dicky. 1996. *Peremajaan Permukiman dengan Pendekatan Pembangunan yang bertumpu pada masyarakat sebagai alternatif penanganan Permukiman Kumuh*

Prajitno, Sakti. 1992. *Pemikiran Ke Arah Usaha Pembenahan Kawasan Kumuh Di Kotamadya Bandung*

Sulestianson, Erick. 2015. *Penanganan Permukiman Kumuh Dengan Pendekatan Karakteristik dan Faktor Penyebab Kekumuhan (Studi Kasus: Permukiman Kumuh di Kelurahan Tamansari dan Kelurahan Braga)*

Suhaeni, Heni. 2012. *Tipologi Kawasan Perumahan Dengan Kepadatan Penduduk Tinggi dan Penanganannya*

C. Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1992
TENTANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DENGAN RAHMAT TUHAN
YANG MAHA ESA

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016
Tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Kriteria Teknis Jalan

Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung No.974/IV.32/hk/2014 tentang penetapan Perumahan dan Pemukiman Kumuh,

D. Media Cetak atau Online

<https://tambahrejo.wordpress.com/2012/09/06/permukiman-kumuhdiperkotaan-dan-permasalahannya/> (Diakses pada tanggal 1 September 2016 Pukul 20.30 WIB)

<https://www.scribd.com/doc/51264117/Transformasi-Program-Penataan-Permukiman-Kumuh> (Diakses pada tanggal 5 September 2016 Pukul 09.00 WIB)

http://ciptakarya.pu.go.id/bangkim/old_file/v2/berita_lengkap.php?id=654
(Diakses pada tanggal 6 September 2016 Pukul 14.00 WIB)

<http://www.bandarlampungnews.com/m/index.php?ctn=1&k=politik&i=12299>
(Diakses pada tanggal 18 September 2016 Pukul 19.00 WIB)

<http://www.jejamo.com/inilah-daerah-kumuh-di-bandar-lampung-segera-ditata-oleh-pemkot.html> (Diakses pada tanggal 25 September Pukul 08.30 WIB)

<http://www.radartvnews.com/2019-bandar-lampung-ditarget-bebas-wilayah-kumuh/> (Diakses pada tanggal 19 Oktober 2016 Pukul 19.30 WIB)

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=267428&val=6772&title=ANALISIS%20DAMPAK%20PERTAMBAHAN%20PENDUDUK%20TERHADAP%20PENYERAPAN%20ANGKATAN%20KERJA> (Diakses pada tanggal 31 September 2016 Pukul 13.15 WIB)